ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCE* (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2009 Q1-2018 Q4)

TESIS

Oleh:

YAHYA MUQORROBIN

NIM: 212117001

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Muqorrobin, Yahya. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah (Periode 2009 Q1-2019 Q4).* **Tesis**, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Shinta Maharani, M.Ak.

Kata kunci: (*Non Performing Finance*) NPF, (Produk Dosmetik Bruto) PDB, Kurs, Inflasi, (*Auto-regressive Distributed Lag*) ARDL

Masih tingginya rasio pembiayaan bermasalah atau NPF pada bank umum syariah merupakan suatu fenomena yang perlu diperhatikan, karena merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Faktor penyebabnya bisa dua arah, pertama adalah faktor-faktor internal yang ada di perbankan syariah itu sendiri salah satunya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, dan kedua adalah faktor-faktor eksternal. Data-data perekonomian yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi sentimen negatif di pasar keuangan, salah satu akibatnya adalah melemahnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengindenfikasi hubungan variabel-variabel makro Produk Domestik Bruto (PDB), kurs dan inflasi dengan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009:1 sampai 2018:4. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah *Auto-regressive Distributed Lag* (ARDL) yang dapat menganalisa keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasilnya PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan kurs dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang.

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 482177 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

Program Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

di

Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama	:	Yahya Muqorrobin
NIM	:	212117003
Judul	:	Analisis Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah (Periode 2009 Q1-2018 Q4)

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 28 Oktober 2019

Pembimbing

Dr. Shinta Maharani, M.Ak.

NIP 1979052003122002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 482177 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Analisis Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah (periode 2009 Q1-2018 Q4)" yang ditulis oleh Yahya Muqorrobin, NIM 212117001, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Rabu, 13 November 2019.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang:
   Iza Hanifuddin, Ph.D. (……..)
   NIP. 196906241998031001 Tanggal: 20 November 2019
2. Penguji Utama:
   Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. (……..)
   Nip. 198707092015031009 Tanggal: 20 November 2019
3. Penguji 2:
   Dr. Shinta Maharani, SE, M.Ak. (……..)
   Nip. 1979052003122002 Tanggal: 20 November 2019

Ponorogo, 20 November 2019
Mengesahkan
Direktur Pascasarjana IAIN
Ponorogo

Dr. Aksin, S.H., M.Ag.
NIP 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yahya Muqorrobin
NIM	: 212117001
Fakultas	: Magister Ekonomi Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Tesis	Analisis Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah (periode 2009 Q1-2018 Q4)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2019
Penulis

Yahya Muqorrobin

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yahya Muqorrobin
NIM	: 212117001
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "Analisis Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah (periode 2009 Q1-2018 Q4)". Adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 28 Agustus 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
9ECBEAHF117087254
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yahya Muqorrobin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pembaharuan pada tahun 1998 dengan munculnya bank syariah. Lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank umum Syariah. Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dimiliki oleh bank adalah berasal dari dana bank itu sendiri, dana dari masyarakat dan dana pinjaman. Salah satu tujuan bank adalah memberikan tempat yang aman bagi para deposan.[1]

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah menyebutkan penyaluran pembiayaan adalah salah satu fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Sistem penyaluran pembiayaan bank syariah diatur oleh ketentuan perbankan karena memiliki peran dalam mengelola likuiditas bank. Kelancaran pengelolaan pembiayaan akan mempengaruhi target likuiditas sehingga mampu meningkatkan kesehatan bank. Bank yang sehat akan mampu mengelola keuangan sehingga terhindar dari profil risiko.

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yang paling mendapat perhatian. Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting bagi

[1] N.Gregory Mankiv, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2000), 447.

perbankan sehingga bank selalu mengembangkan pengelolaan pembiayaan. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan berbagai macam cara untuk meminimalisir risiko-risiko yang ada dan untuk memaksimalkan pendapatan yang diterima oleh bank. Penilaian profil risiko dalam perbankan dibagi menjadi beberapa bagian, salah satu diantaranya yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank harus berhati-hati dan lebih selektif dalam menyalurkan dananya kepada nasabah untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah dikenal dengan *Non Performing Finance* (NPF). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15[2], bank dikatakan tidak sehat jika rasio NPF lebih dari 5%.

Masih tingginya rasio pembiayaan yang bermasalah atau NPF pada bank umum syariah merupakan suatu fenomena yang perlu diperhatikan, Merujuk pada data statistik perbankan syariah (SPS) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi rasio pembiayaan bermasalah alias NPF pada bank umum syariah selama 2009-2018 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, bahkan pada quartal II 2016 NPF berada pada posisi yang cukup mengkawatirkan di angka 5.68%. Akan tetapi beberapa periode terakhir NPF bank umum syariah mengalami perbaikan berada di level 3,39% untuk Bank Umum Syariah (BUS) per Januari 2019.[3]

[2] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/pojk.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal

[3] www.ojk.go.id

Tingginya rasio NPF merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan pembiayaan yang dilakukan dengan ratio NPF, semakin tinggi NPF suatu bank, maka semakin buruk pula kinerja bank tersebut. NPF akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Selain itu kenaikan tingkat NPF sering disebut sebagai kegagalan kebijakan kredit dan peningkatan tingkat NPF adalah alasan utama pengurangan laba bank dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan.[4]

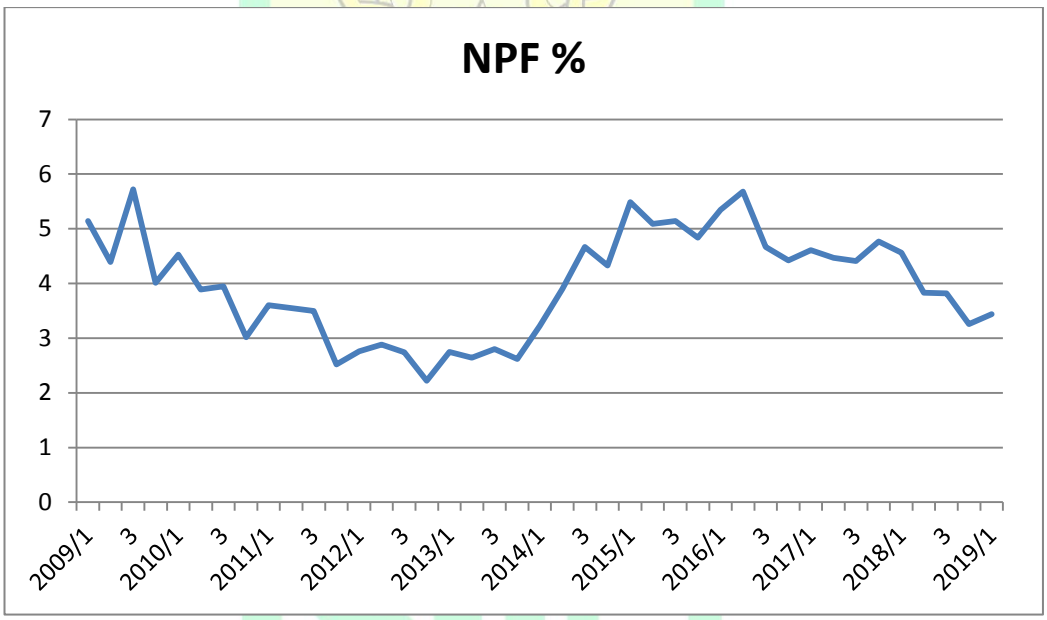

Gambar 1.1 Grafik *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia (dalam persen)

Sumber : Data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi yang terjadi pada NPF bank umum syariah, di awali dengan membengkaknya angka NPF yang mencapai angka

[4] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 303.

5,72 pada quartal ke III 2009 merupakan dampak memburuknya perekonomian Indonesia pasca terjadinya krisis global yang berawal dari Amerika Serikat pada tahun 2008. Belajar dari pengalaman ini pada tahun-tahun berikutnya menjaga stabilitas keuangan menjadi prioritas bagi bank sentral di setiap Negara termasuk Indonesia, yang hasilnya dapat dilihat dengan membaiknya angka NPF pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2015 perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia dibarengi oleh meningkatnya risiko kredit perbankan. Iklim bisnis yang makin tak kondusif ini kemudian menyebabkan kredit bermasalah perbankan mengalami kenaikan kembali.

Tabel 1.1 perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) dan total pembiayaan Bank Umum Syariah

Tahun	NPF %	NPF (Milyar Rupiah)	Total Pembiayaan (Milyar Rupiah)
2015	4.84	4.915	153.968
2016	4.42	3.860	177.482
2017	4.76	4.880	189.789
2018	3.25	3.938	202.298

Sumber: BPS (Data diolah)

Jika merujuk pada Tabel 1.1 selama periode beberapa tahun terakhir total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Dari segi pembiayaan bermasalah juga mengalami perbaikan, meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan yang terjadi karena tersendatnya pertumbuhan sektor riil. Tersendatnya pertumbuhan sektor riil itu terutama terjadi di sektor

pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait dengan itu. Hal tersebut berimbas terhadap kinerja pembiayaan perbankan syariah.

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB)[5].

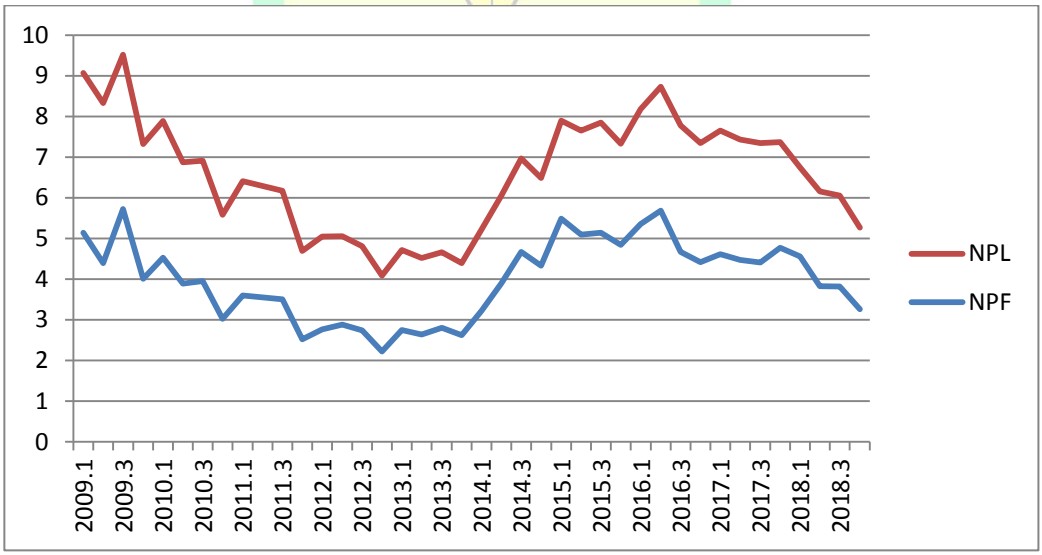

Gambar 1.2 Grafik NPF Bank Umum Syariah dan NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia (dalam persen)

Sumber**:** Data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah

[5]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 35.

Jika melihat pada Gambar 1.2, terlihat pergerakan trend yang sama antara NPF dan NPL. Akan tetapi dalam segi angka NPF selalu lebih tinggi dari NPL, ini menuntuk beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh bank syariah yaitu harus lebih hati-hati dan selektif di dalam pembiayaan terutama harus bisa memberikan pelayanan yang prima. Selain itu faktor internal manajemen risiko pembiayaan bank syariah lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam kasus ketika rekanan tidak melakukan pembayaran, bank syariah dilarang untuk menagaih biaya tambahan (bunga) kecuali dalam kasus penundaan yang disengaja. Nasabah dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak akan mengenakan denda (bunga). Dan selama penundaan dalam pembayaran tersebut, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif sehingga kinerja bank tersebut dapat menurun.

Penyebab tingginya rasio pembiayaan bermasalah sendiri bisa disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal perbankan. Dari sisi internal perbankan bisa dalam bentuk kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, biaya-biaya dan pendapatan, atau dalam arti lain bahwa kekayaan (jumlah asset), perputaran asset, jumlah hutang, jumlah modal, tingkat penjualan, laba operasi, likuiditas perusahaan dan lainnya. Dari sisi eksternal bisa disebabkan faktor-faktor seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, resesi,

inflasi, dan kebijakan moneter lainnya.[6] Adanya hubungan sebab akibat (*feedback loop*), dimana hasil (*output*) dari sebuah peristiwa akan menjadi masukan (*input*) lain dari situasi lainnya. Dalam sistem keuangan, *feedback loop* terjadi antara sistem keuangan dengan sektor riil. Permasalahan yang bersumber dari sektor keuangan dapat berdampak hingga ke sektor riil, dan sebaliknya.

Krisis sistemik yang mengguncang sektor keuangan di Asia Tenggara pada tahun 1997 telah memberikan bukti adanya hubungan yang kuat antara stabilitas makroekonomi dan perbankan. Tingkat kerusakan di pasar keuangan di Indonesia pada akhir tahun 1990an telah menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi sangat mengarah pada krisis perbankan. Krisis yang dimulai dengan depresi mendalam di mata uang Thailand Baht pada bulan Juni 1997 kemudian berkembang ke Indonesia yang secara signifikan meningkatkan inflasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 77,6 persen di tahun berikutnya. Sebagai bagian dari usaha pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia 1997/1998 Bank Indonesia menjalankan pendekatan makroprudensial. yaitu kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makro ekonomi dengan mikro ekonomi. Istilah makroprudensial mengemuka dan menjadi sangat populer di sektor keuangan paska terjadinya krisis keuangan global.[7]

---

[6] Kuncoro Mudrajad Suhardjono *et.al*, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2002), 30.

[7] Departemen Kebijakan Makroprudensial, *mengupas kebijakan makroprudensial* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 2.

Pada krisis 1998, hal unik terjadi dimana bidang perbankan dan ekonomi ketika krisis terjadi ada dua lumbung yang secara ajaib tetap kebal (*imune*) terhadap krisis, yakni ekonomi rakyat dan perbankan syariah.. Ekonomi rakyat dengan mengagumkan dapat bertahan dan menjadi "penolong" perekonomian. Meski kecil, namun ekonomi rakyat berhasil menunjukkan kekuatannya. Namun yang paling mengagumkan adalah daya tahan yang ditunjukkan oleh perbankan syariah. Berhubung krisis moneter sangat berkaitan erat dengan perbankan, maka daya tahan perbankan syariah menjadi sebuah bukti empirik yang tidak terbantahkan bahwa koridor syariah dalam perbankan bukan sekedar menjadi alternatif bank konvensional. Keunggulannya bahkan diprediksi dapat menyaingi bank konvensional. Krisis moneter dan penurunan nilai tukar rupiah terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Tingginya nilai suku bunga sebagai penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan dan sektor riil yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.[8]

Ada beberapa hal yang terjadi pada bank konvensional dan perekonomian Indonesia ketika krisis moneter melanda: Pertama, Perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk operasionalnya. Kedua, bank konvensional berbasis sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi yang berbasis kapitalis, prinsip dasarnya adalah interest base yang menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan.

[8] Robby Milana, *Perbankan Syariah Kebal di Tengah Krisis* (kompasiana, juni 2010)

Ketiga, perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga. Di sisi lain sistem manajemen syariah disebut-sebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ini menggarisbawahi bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan, apalagi mengandung unsur spekulasi yang diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, sistem syariah juga menekankan bahwa peredaran uang tidak boleh terjadi hanya dibeberapa kelompok saja, karena akan terjadi konsentrasi modal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian pada masyarakat ditingkat bawah. Hal-hal tersebut yang menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah.

Krisis keuangan kedua terjadi pada tahun 2007 diawali dengan krisis yang disebut *subprime mortgage*[9] di Amerika Serikat, sehingga beberapa negara perlu melakukan koreksi pada target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Beberapa ekonom berpendapat bahwa dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi negara yang mengalami dampak krisis keuangan untuk benar-benar pulih dari krisis tersebut. Walaupun krisis tersebut bermula di Amerika Serikat, namun beberapa negara berkembang yang perekonomiannya bergantung pada Amerika Serikat juga akan mengalami krisis tersebut.

[9] Paket kredit kepemilikan rumah yang ditujukan bagi orang-orang atau konsumen yang memiliki kelayakan kredit kurang dari cukup

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang Periode 2006 - 2010

No	*Negara*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
1.	Korea	5.18	5.46	2.83	0.70	6.50
2.	Jepang	1.42	1.65	-1.10	-5.42	4.20
3.	Indonesia	5.50	6.34	6.01	4.70	6.37
4.	India	9.26	9.80	3.89	8.48	10.26

Sumber *: Organization for Economics Co-Operation and Development*[10]

Pada tahun 2007 dan 2008, Indonesia tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan dengan Korea, Jepang dan India, namun, pada masa pemulihan yang dimulai tahun 2009 negara berkembang lebih tahan terhadap krisis dibanding dengan negara maju, hal ini terlihat dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 berada pada angka 4.70 dan India pada angka 8.48, berbeda halnya pada negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang dampak krisis sangat terasa pada masa pemulihan tahun 2009 yaitu pertumbuhan kedua negara tersebut berada pada angka 2.83 dan -1.10. Menurut *World Development Report* 2009 "Negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan dengan negara-negara maju, karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan AS dan Eropa yang terkena imbas paling besar". Baik IMF dan Bank Dunia menekankan akan adanya kerentanan dan ketidakpastian.

Pengalaman krisis tersebut sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang berharga, sehingga pada saat krisis keuangan global 2007/2008 yang

[10] https://data.oecd.org

dipicu oleh kegagalan produk *subprime mortgage* di Amerika Serikat, Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial yang dimilikinya sudah lebih siap dengan berbagai langkah yang dapat menahan pemburukan kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri. Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi mikroprudensial yang terkait dengan kesehatan, kinerja, dan kelangsungan usaha individual bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013, sementara Bank Indonesia diamanatkan untuk tetap menjalankan fungsi makroprudensial[11].

Bila kebijakan mikroprudensial difokuskan pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan (bank dan non-bank) dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Karakteristik kebijakan makroprudensial yang mencakup dimensi runtun waktu (*time series*) dan antarsubjek (*cross section*) mampu melengkapi kebijakan mikroprudensial dalam meredam amplifikasi risiko.

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industri yang menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan karena kegiatan

[11] Departemen Kebijakan Makroprudensial, *mengupas kebijakan makroprudensial, 2.*

perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan. Ini sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 juga menyebutkan faktor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mempengaruhi nilai tukar, siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya.[12]

Salah satu variabel ekonomi makro yang terkait dengan perbankan adalah PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan bentuk pengukuran pendapatan nasional sebuah negara. PDB memberikan gambaran mengenai jumlah output atau barang dan jasa akhir yang diproduksi sebuah kawasan tertentu dalam kurun waktu tertentu. PDB mencerminkan kondisi suatu negara apakah negara tersebut perekonomiannya mengalami kemajuan atau sebaliknya. [13] Ketika PDB suatu negara tinggi maka bisa dikatakan pendapatan rata-rata masyarakat negara tersebut juga tinggi. Peningkatan pertumbuhan PDB dapat dijadikan sebagai indikator bagi perbankan untuk menyalurkan kreditnya sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Ketika PDB mengalami peningkatan maka rasio NPF akan menurun. Apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat maupun perusahaan bertambah maka usaha yang dijalankan oleh produsen juga bagus. Ketika usaha tersebut bagus, risiko gagal

[12] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[13] Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan, "Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap Non Performing Finance Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61*(Agustus 2018), 170.

bayar terhadap pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat ditekan karena nasabah mampu membayar kewajibannya.

Variabel makro lain yang turut mempengaruhi kemampuan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sering muncul dan dialami oleh hampir semua negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa memerangi laju inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang sering dikenal dengan stabilitas harga. Pengaruh inflasi terhadap perbankan yaitu, ketika inflasi tinggi harga barang-barang akan mengalami peningkatan. Ketika harga meningkat, pengeluaran masyarakat akan lebih besar dibandingkan keadaan normal. Jumlah pengeluaran yang meningkat berbanding terbalik kepada kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah.

Dampak kenaikan inflasi biasannya direspon BI dengan meningkatkan BI rate. Kenaikan BI rate akan meningkatkan biaya pembiayaan yang berupa nisbah bagi hasil atau margin pembiayaan, sehingga nilai pengeluaran pembiayaan bank syariah turun. Ada kecenderungan nilai BI Rate dari tahun 2011 sampai 2017 mengalami penurunan. Keadaan ini akan menurunkan tingkat bunga bank konvensional, bila bank syariah tidak merespon cepat dengan menurunkan nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan maka akan

mengurangi jumlah pembiayaan. Hal ini akan mengurangi jumlah pembiayaan sehingga menurunkan risiko bermasalah pada bank syariah.[14]

Kurs menjadi salah satu variabel bebas yang bergerak berpengaruh pada kinerja perbankan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam beberapa periode terakhir juga mempengaruhi dunia perbankan khususnya pada NPF.[15] Efek secara langsung, bisa datang dari kewajiban utang denominasi valuta asing yang dimiliki oleh bank. Sementara secara tidak langsung, efeknya datang dari debitur atau nasabah bank yang memiliki usaha berorientasi impor. Saat kurs melemah, arus kas debitur atau nasabah dengan usaha orientasi impor akan memiliki beban usaha yang lebih besar. Ambil contoh sebuah perusahaan memiliki utang senilai $1 juta. Jika kurs rupiah Rp13.800 per dolar AS, maka utang perusahaan tersebut setara Rp13,8 miliar. Sedangkan jika nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp14.800 per dolar AS, maka utang perusahaan tersebut membengkak menjadi Rp14,8 miliar. "Selisih besaran itulah yang menyebabkan kewajiban utang perusahaan menjadi lebih besar dan berpotensi menjadi kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) di industri perbankan".

Berdasarkan beberapa fakta diatas maka penting untuk mengkaji menganalisis dampak ekonomi makro terhadap kesehatan bank syariah utamanya melalui NPF.

---

[14] Indri Supriani, Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia", *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6* 2018, 4.

[15] Bayu Widokartiko dkk. "Dampak Kinerja Internal dan Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan", *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 2 No. 2*, Mei 2016. 163.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh variabel PDB terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek?
2. Bagaimanakah pengaruh variabel inflasi terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Bagaimanakah pengaruh variabel dan kurs terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui faktor-faktor variabel makro yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Umum Syariah (BUS), adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel PDB terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel inflasi terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kurs terhadap variabel NPF Bank Umum Syariah (BUS) dalam jangka panjang dan jangka pendek.

PONOROGO

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan khasanah teori tentang keterkaitan sektor ekonomi makro dengan dunia perbankan syariah khusunya pada bidang pembiayaan bermasalah (NPF)

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan bagi penulis, pembaca, peneliti dan khususnya pihak perbankan syariah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan guna meningkatkan mengendalikan jumlah pembiayaan bermasalah.

IAIN PONOROGO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Makroprudensial

Di Indonesia, istilah makroprudensial secara implisit telah digunakan sejak awal tahun 2000 sebagai respon atas krisis keuangan tahun 1997/1998, yang ditandai dengan penyusunan kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) di Bank Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000, Bank Indonesia telah memperhatikan aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[16]

IMF mendefinisikan makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. *European Systemic Risk Board* (ESRB), yaitu badan yang memiliki misi mengawasi sistem

[16]Departemen kebijakan makroprudensial, *mengupas kebijakan makroprudensial*, 2.

keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya risiko sistemik di sistem keuangan Eropa, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.[17]

Merujuk pada beberapa definisi di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) kalimat kunci untuk menggambarkan kebijakan makroprudensial, yakni diterapkan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan (*system-wide perspectives*), dan diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya (*build-up*) risiko sistemik. Secara sederhana kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Mengapa demikian? Karena kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir meminimalkan terjadinya risiko sistemik.

[17]Ibid, 3.

Dalam beberapa penelitian, risiko sistemik didefinisikan sebagai risiko yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan peningkatan ketidakpastian dalam sistem keuangan sehingga sistem keuangan tidak dapat berfungsi dengan baik dan mengganggu jalannya perekonomian.[18] Risiko sistemik dapat terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga, atau terjadi secara perlahan-lahan tanpa disadari atau dideteksi oleh berbagai pihak sehingga kebijakan yang tepat dapat terlambat diterapkan. Efek negatif risiko sistemik pada perekonomian dapat dilihat dari peningkatan jumlah gangguan pada sistem pembayaran, aliran kredit, dan penurunan nilai aset.' Secara sederhana kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi.

Ada dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial. Pertama adalah dimensi waktu (*time series*), yaitu kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menekan resiko terjadinya *prosiklikalitas*[19] yang berlebihan dalam sistem keuangan. Konteks kebijakan makroprudensial harus didesain sedemikian rupa hingga mampu menghilangkan atau paling tidak memitigasi *prosiklikalitas*. Prinsipnya adalah bagaimana mendorong institusi keuangan untuk mempersiapkan bantalan (*buffer*) yang cukup di saat perekonomian sedang baik, yaitu ketika ketidakseimbangan dalam

[18] Tobias M.C. Asser, *Legal Aspects of Regulatory Treatment of Banks in Distress*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2001), 20.

[19] Keadaan dimana perekonomian tumbuh lebih cepat ketika fase ekspansi dan perekonomian memburuk ketika fase kontraksi.

sistem keuangan umumnya terjadi, dan bagaimana menggunakan bantalan tersebut ketika perekonomian sedang memburuk.[20]

Kedua adalah dimensi antar sektor (*cross-section*), yang menggeser fokus dari regulasi prudensial yang diterapkan pada individual lembaga keuangan menuju pada regulasi sistem secara keseluruhan. Sejarah krisis keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari krisis keuangan yang terjadi di dunia bukanlah akibat dari masalah individual bank yang kemudian menular secara keseluruhan dalam sistem keuangan. Sebaliknya, krisis-krisis besar yang terjadi merupakan akibat dari eksposur terhadap ketidakseimbangan makro-keuangan yang dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar pelaku sistem keuangan. Oleh sebab itu, pandangan yang lebih holistik terhadap sistem keuangan dan hubungannya dengan perekonomian makro dari berbagai sisi sangat diperlukan.

Perkembangan di atas sejalan dengan perubahan tatanan sektor keuangan, terutama pasca krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral menerapkan instrumen kebijakan makroprudensial dalam artian yang lebih luas. Beberapa instrumen yang sebelumnya lebih dikenal sebagai instrumen moneter (seperti *reserve requirements*) juga digunakan untuk mencegah resiko sistemik dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam siklus kegiatan ekonomi, khususnya untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Instrumen kebijakan tersebut juga tidak difokuskan pada upaya untuk menangani resiko yang terjadi pada individual bank. Dengan

[20] Departemen kebijakan makroprudensial, *mengupas kebijakan makroprudensial, 3.*

demikian, instrumen kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan dalam perspektif 'makroprudensial' yang lebih luas.

2. *Non Performing Finance* (NPF)

Non Performing Finance (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Dalam dunia perbankan konvensional NPF juga disebut dengan NPL atau *Non Performing Loan*, yang intinya merupakan pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasanya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja. NPF merupakan salah satu permasalahan terbesar bagi perbankan karena NPF merupakan penyebab utama kegagalan bank. Perlu diketahui bahwa lebih dari 70 persen neraca perbankan sangat dipengaruhi oleh manajemen risiko pembiayaan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut NPF merupakan penyebab utama kegagalan perbankan.[21] NPF adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang dikategorikan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. Dan yang dimaksud dengan *NPF* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyaluran dana oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan merupakan aktiva produktif (*earning asset*) yang harus dijaga kualitasnya. Pendapatan bank syariah sangat tergantung pada kualitas aktiva produktif, dimana ketika kualitas aktiva produktif baik maka potensi pendapatan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya ketika kualitas aktiva produktif buruk maka akan menurunkan potensi pendapatan. Teknik yang digunakan bank

[21] Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Risk Analisis For Islamic Bank* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 115.

syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan (NPF) adalah sama dengan yang digunakan oleh bank umum. Sedangkan yang paling umum digunakan adalah dengan mengandalkan catatan sejarah nasabah dengan bank tersebut dan mengumpulkan informasi tentang kelayakan pembiayaan terhadap nasabah yang bersangkutan melalui sumber-sumber informasi dan jaringan masyarakat lokal.[22] Dalam hal pembiayaan bank cenderung melihat rapor nasabah yang bersangkutan dalam mempertimbangkan pembiayaan.

Beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan (NPF) diantaranya adalah sebagai berikut[23]:

a. Lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi untuk pendanaan, menggunakan berbagai instrumen-instrumen pembiayaan sesuai degan syariah.
b. Lembaga keuangan syariah harus melaksanakan tinjauan *due diligence* [24] mengenai pihak rekanan sebelum menentukan pilihan instrumen keuangan syariah yang sesuai.
c. Lembaga keuangan syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan eksposur[25] risiko pembiayaan yang timbul dalam setiap instrumen pendanaan syariah.

[22] Ibid.
[23] Ibid.,116.
[24] *Due diligence* adalah Istilah yang biasa digunakan untuk proses pengambilan keputusan di perusahaan (perbankan) yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
[25] Eksposur adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan (perbankan) apabila risiko yang dipredisikan benar-benar terjadi.Eksposur biasanya berkaitan dengan ukuran keuangan, seperti saham, laba pertumbuhan pembiayaan, penjualan dan lain sebagainya.

d. Lembaga keuangan syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko sesuai syariah untuk setiap instrumen pendanaan syariah.

Prinsip di atas meliputi identifikasi risiko yang ada dan risiko potensial, difinisi kebijakan yang mencakup filosofi manajemen risiko bank, dan pengaturan parameter yang akan mengontrol risiko pembiayaan. Berikut ini beberapa kebijakan khusus yang digunakan untuk mengurangi risiko NPF adalah sebagai berikut, pertama kebijakan untuk membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan, termasuk kebijakan pada konsentrasi dan eksposur besar, diversifikasi[26], pinjaman pada pihak terkait dan eksposur berlebihan pada sektor atau wilayah. Kedua, mengklasifikasi aset, hal ini menghasruskan evaluasi berkala terhadap kolektabilitas dari portofolio instrument pembiayaan dan yang ketiga, mencadangkan kerugian atau membuat cadangan pada tingkat yang memadai untuk menyerap kerugian yang telah diantisipasi.[27]

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut[28]:

a. Faktor internal, yaitu kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

   1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif

[26] Penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa dan investasi.

[27] Greuning dan Iqbal, *Risk Analisis For Islamic Bank*, 116.

[28] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 360.

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target kredit dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong penjabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk dalam daftar kredit macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin.

2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Di samping itu, salah satu

penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi internal bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit.

3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan.

4) Lemahnya informasi kredit

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

5) Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banyaknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja

melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama *legal lending limit.* Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya *fiktif.* Padahal kredit tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik.

b. Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari:

1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

   Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

   Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.

3) Kegagalan usaha debitur

   Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan

dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional.

4) Debitur mengalami musibah

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia.

Karekteristik unik dari instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memunculkan risiko pembiayaan diantaranya sebagai berikut[29]:

a. Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko pembiayaan sewaktu memberikan aset kepada nasabah tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* yang tidak mengikat, dimana nasabah mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk yang dibeli oleh bank, bank menghadapi risiko pasar dan risiko harga.

b. Dalam perjanjian *bay al-salam* atau *istisna'*, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan pasokan tepat waktu, gagal menyediakan pasokan atau gagal memasok barang dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran, atau dalam

[29] Greuning dan Iqbal, *Risk Analisis For Islamic Bank*, 121.

pengiriman produk dapat mengespos bank syariah terhadap kerugian keuangan dan juga kerugian modal.

c. Dalam kasus investasi *mudharabah*, dimana bank syariah membuat perjanjian usaha dengan nasabah sebagai *mudharib*. Bank syariah menghadapi risiko pembiayaan lebih luas dari pada nasabah pembiayaan. Sifat perjanjian *mudharabah* yang tidak memberikan hak kepada no untuk mengawasi *mudharib* dalam mengelola proyek usaha secara langsung (akurat). Hal inilah yang membuat bank kesulitan dalam pengawalan dan penilaian terkait risiko pembiayaan pada proyek kegiatan usaha tersebut. Risiko ini sering muncul karena kurangnya keterbukaan antara pihak pengelola dan pihak bank.

Manajemen risiko pembiayaan bank syariah lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam kasus ketika rekanan tidak melakukan pembayaran, bank syariah dilarang untuk menagaih biaya tambahan (bunga) kecuali dalam kasus penundaan yang disengaja. Nasabah dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak akan mengenakan denda (bunga). Dan selama penundaan dalam pembayaran tersebut, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif sehingga kinerja bank tersebut dapat menurun.[30]

Menggunakan anggunan sebagai jaminan terhadap risiko pembiayaan adalah hal yang umum dalam bank syariah. Bank dapat

[30] Ibid.

meminta nasabah untuk menyerahkan aggunan sebelum pembiayaan dilakukan. Perlu diketahui bahwa, menggunakan anggunan sebagai jaminan bukan berarti tanpa kesulitan terutama di negara-negara berkembang. Karena masalah yang biasanya muncul adalah terkait masalah likuiditas dari anggunan tersebut atau bank tidak mampu menjual anggunan tersebut, kesulitan dalam menentukan nilai pasar wajar secara periodik dan kendala hukum serta hambatan dalam menguasai anggunan tersebut. Lemahnya lembaga-lembaga hukum dan lambatnya proses eksekusi, menyulitkan ban untuk menguasai anggunan tersebut.[31]

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).[32] Bank syariah harus meminimalisir NPF karena tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selain itu tingginya angka NPF adalah idikator kesehatan bank syariah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, kriteria penilaian peringkat NPF adalah sebagai berikut[33]:

a. Peringkat 1, NPF < 2%

[31] Ibid.

[32] Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang *Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*

[33] Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia.*

Kualitas aset sangat baik dengan resiko portofolio yang sangat minimal.

b. Peringkat 2, 2% ≤ NPF < 5%

Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.

c. Peringkat 3, 5% ≤ NPF < 8%

Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

d. Peringkat 4, 8% ≤ NPF < 12%

Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.

e. Peringkat 5, NPF ≥ 12%

Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk diselamatkan.

3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pertumbuhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan menjumlahkan semua output dari warga negara yang bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan[34]. PDB terbagi menjadi dua, yaitu PDB riil dan PDB nominal. PDB riil adalah ukuran yang paling luas yang dapat menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian. Seringkali para ekonom menggunakan PDB riil untuk dapat menggambarkan kemakmuran

[34] Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Erlangga, 2002), 162.

ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mengukur kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga.[35]

Ada tiga macam pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yaitu[36]:

1. Pendekatan hasil produksi atau *product approach*, dalam mencoba menghitung menghitung besarnya pendapatan nasional dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk satu periode tertentu dari semua unit-unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Semua nilai akhir barang-barang dan jasa tersebut dijumlahkan.
2. Pendekatan pendapatan atau *income approach*, dalam mencoba menghitung pendapatan nasional ialah dengan mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah-rumah tangga keluarga.
3. Pendekatan pengeluaran atau *expenditure approach*, dalam mencoba menghitung besarnya pendapatan nasional ialah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri.

Dari ketiga metode tersebut di atas yang sering digunakan adalah metode pengeluaran/penggunaan dengan rumus sebagai berikut[37]:

---

[35] Gregory N. Mankiw, 2003. *Teori Makroekonomi (edisi kelima)* (Jakarta: Gelora Angkasa Pratama, 2003), 22.

[36] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), .38.

$$PDB = C + I + G(X - M)$$

Keterangan:

C : Pengeluaran konsumXsi barang dan jasa pribadi

I : Investasi

G : Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik dari konsumsi maupun investasi

X : Mewakili ekspor

E : Mewakili impor

Perkembangan PDB sebagai salah satu indikator dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. PDB ini mencerminkan kapasitas keluaran yang dapat dihasilkan perekonomian dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam perekonomian[38]. Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan individu maupun perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan individu maupun perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah. Namun sebaliknya ketika PDB meningkat artinya kondisi perekonomian masyarakat juga ikut membaik sehingga resiko pembiayaan bermasalah juga turun.

4. Inflasi

[37] Paulus Kurniawan. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. (Bandung. Alfabeta, 2015), 117.

[38] Imam Mukhlis. *Ekonomi Keuangan dan Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Empat 2015), 127.

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang/komiditas jasa[39]. Menurut Bank Indonesia inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus[40]. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah "kenaikan harga secara umum" dan yang kedua adalah "terus-menerus". Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu.

Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai

[39] Adimarwan Karim. *Ekonomi Makro Islam*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 135.
[40] https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx

pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan “masalah kronis” ekonomi.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang inflasi:

1. Teori kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di jaman yang modern ini, terutama di negara – negara yang sedang berkembang. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari dua hal. Pertama, Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga-harga tersebut[41].

Kedua. psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga – harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan- bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang

[41] Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2.* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 167-169.

sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961 – 1966[42].

2. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang- barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*[43])[44].

Inflationary gap timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan

[42] Ibid.

[43] Besarnya perbedaan antara jumlah investasi yang terjadi dengan besarnya *full employment saving*, dimana besarnya investasi tersebut melebihi besarnya *full employment saving*.

[44] Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, 170.

tersebut mugkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.[45]

3. Teori Strukturalis

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran *supply* bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.[46]

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga. Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang dikumpulkan memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai indeks harga konsumen. Berdasarkan

[45] Ibid, 171.
[46] Ibid, 172.

indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu.[47]

Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan antara lain[48]:

a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu.Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masingmasing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHK adalah sebagai berikut:

$$Inflasi\ tahun\ t = \frac{IHK(tahun\ t) - IHK(tahun\ t-1)}{IHK(tahun\ t-1)}\ x\ 100\%$$

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen.Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (production price index).IHPB menunjukkan tingkat harga yang

[47] Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*.(Jakarta: Erlangga, 2002), 254.
[48] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 127.

diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip perhitungan berdasarkan IHPB adalah sebagai berikut:

$$Inflasi\ tahun\ t = \frac{IHPB\ (tahun\ t) - IHPB\ (tahun\ t - 1)}{IHPB\ (tahun\ t - 1)} x100\%$$

c. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP Deflator), disingkat IHI. Angka deflator (IHI) ini dapat diperoleh melalui perhitungan, sebagai berikut :

$$IHI\ tahun\ t\ = \frac{harga\ (tahun\ t)}{harga\ tahun\ t - 1} x\ 100\%$$

Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks :

$$Inflasi\ tahun\ t\ = \frac{IHI\ (tahun\ t) - IHI\ (tahun\ t - 1)}{IHI\ (tahun\ t - 1)} x100\%$$

Dari segi asalnya terjadinya inflasi ada dua macam yaitu : 1) Inflasi domestik, 2) inflasi impor. Dan faktor yang menimbulkan inflasi sebagai berikut[49] :

d. *Structural Inflation*, yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural (*structural rigidities*) yang menyebabkan penawaran di dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

e. *Cost push inflation*, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya aggregate supply curve ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan aggregate supply curve bergeser tersebut adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikkan harga komoditi di pasar komoditi. Dalam kasus cost push inflation kenaikan harga seringkali diikuti oleh kelesuan usaha.

f. *Demand full inflation,* yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan aggregate demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan menarik (pull) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi excess demand , yang merupakan inflationary gap. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti

[49] Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta 2014), 197.

dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi full-employment.

Berdasarkan tingkat keseriusannya, inflasi dapat digolongkan menjadi tiga tingkat[50]:

a) *Low Inflation*, atau disebut juga inflasi satu dijid (*single digit inflation*), yaitu inflasi dibawah 10%. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.
b) *Golloping Inflation*, atau double digit bahkan *triple digit inflation* Didefinisikannya inflasi antara 20% sampai 30% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, perang, revolusi, atau kejadian lainyang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah, sehingga orang tidak percaya kepada uang
c) *Hyper Inflation*, Yaitu inflasi diatas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang dari pada menyimpan uang.

Inflasi menganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan konstan. Risiko keuangan juga muncul dikarenakan

[50] Johanputro, bramantyo, *Prinsip-prinsip ekonomi makro* (Jakarta: PPM, 2008), 149.

adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka akan menyebabkan resiko daya beli. Resiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil dari pada yang diharapkan.

Ketika inflasi mengalami guncangan dalam arti inflasi meningkat, maka NPF mengalami peningkatan. Ketika terjadi inflasi dimana terjadi kenaikkan harga secara terus menerus, daya beli masyarakat akan menurun karena nilai uang terus tergerus inflasi. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaannya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.[51]

5. Kurs

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah

[51] Hermawan Soebagia. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di Indonesia", *Tesis* (Program Pasca Sarjana Magister. 2005).

harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD[52].

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:

NTIDR/USD = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD) NTIDR/YEN = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.

Dalam sejarah sistem moneter internasional, penentuan dan sistem nilai tukar suatu negara mempunyai evolusi yang panjang. Pada awal sistem moneter internasional modern pada abad ke-19, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengacu kepada standar emas (*Gold Standard*). Sistem ini juga mengalami pasang surut sehingga muncul sistem nilai tukar dengan mengacu pada kesepakatan *Bretton Woods*. Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama sehingga sejak tahun 1970-an, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai

[52]Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), 4.

tukar yang digunakan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), tetapi juga sistem nilai tukar mengambang (*Flexible exchange rate*) atau variasi dari kedua sistem tersebut. Selain itu, perkembangan terakhir yang tidak kalah menariknya adalah pembentukan mata uang bersama dari anggota *European Monetary Union* pada tahun 1999 dan diberlakukan penuh pada tahun 2002.[53]

Mengikuti perkembangan ekonomi dan keuangan internasional, sistem nilai tukar dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan pada seberapa kuat tingkat pengawasan pemerintah terhadap nilai tukar. Secara umum nilai tukar dapat dibagi menjadi empat sistem nilai tukar, yaitu[54]:

a. Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system)*

   Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Bila pada suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada pada kisaran yang diinginkan. Pada kondisi tertentu bila diperlukan pemerintah akan melakukan pemotongan nilai mata uang-nya (*devalue*) terhadap mata uang negara lain. Pada kondisi lain, pemerintah dapat

[53] Ibid., 1-2.

[54] Jeff Madura, *Keuangan Perusahaan Internasional, Edisi 8* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 220.

mengembalikan nilai mata uang (*revalue)* atau meningkatkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lain.

b. Sistem kurs mengambang bebas (*freely floating exchange rate system*)

Pada sistem nilai tukar ini, nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Bila pada sistem kurs tetap tidak diperbolehkan adanya fleksibilitas nilai tukar, pada sistem mengambang bebas memperbolehkan adanya fleksibilitas secara penuh. Pada kondisi nilai tukar yang mengambang, nilai tukar akan disesuaikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan dari mata uang tersebut.

c. Sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating exchange rate system*)

Dalam sistem ini, fluktuasi nilai tukar dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resmi. Hal ini sama dengan sistem tetap, dimana pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya.

d. Sistem kurs terikat (*pegged exchange rate system)*.

Beberapa negara menggunakan sistem mata uang terikat, dimana mata uang lokal mereka dikaitkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada sebuah jenis mata uang tertentu. Nilai mata uang lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang dijadikan ikatan tersebut[55].

[55] Ibid.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar adalah sebagai berikut[56]:

a. Tingkat Inflasi Relatif, yaitu perubahan pada tingkat inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu mata uang dan karenanya mempengaruhi kurs nilai tukar.
b. Suku Bunga Relatif, yaitu perubahan pada suku bunga dapat mempengaruhi investasi pada sekuritas asing, yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu mata uang dan karenanya mempengaruhi kurs nilai tukar.
c. Tingkat Pendapatan Relatif, yaitu pendapatan mempengaruhi jumlah permintaan barang impor, maka pendapatan dapat mempengaruhi kurs mata uang.
d. Pengendalian Pemerintah, yaitu Pemerintah negara asing dapat mempengaruhi kurs keseimbangan dengan berbagai cara yaitu mengenakan batasan atas pertukaran mata uang asing, mengenakan batasan perdagangan asing, mencampuri pasar uang asing (dengan membeli dan menjual mata uang) dan mempengaruhi variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan.
e. Predikasi Pasar, yaitu harapan pasar mengenai kurs mata uang di masa depan. Seperti pasar keuangan lain, pasar mata uang asing juga bereaksi terhadap berita yang memiliki dampak di masa depan.

[56] Ibid., 128.

Dalam era globalisasi perekonomian dunia, pergerakan uang antarnegara tidak mengenal batas lagi. Uang bergerak dengan cepat dari suatu negara ke negara lain dan cenderung menuju ke tempat yang menghasilkan pendapatan terbesar. Selain itu, uang juga diperdagangkan sebagai barang sehingga mata uang suatu negara cukup rentan terhadap kegiatan spekulasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka nilai mata uang suatu negara juga sangat dipengaruhi aliran modal antarnegara dan kegiatan spekulasi. Dengan perkembangan global tersebut maka negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap atau dengan variasinya sangat rentan terhadap arus balik modal dan kegiatan spekulasi. Krisis nilai tukar yang terjadi di negara-negara Amerika Latin pada awal 3 1990-an dan negara Asia tahun 1997/1998 terutama diakibatkan dari kedua faktor tersebut.[57]

Data empiris menunjukkan bahwa krisis nilai tukar berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara, seperti yang telah dirasakan oleh beberapa negara Asia pada tahun 1997/98. Krisis nilai tukar ini tidak hanya mengakibatkan harga-harga membumbung tinggi, tetapi juga mengakibatkan kontraksi perekonomian yang cukup dalam. Melemahnya nilai tukar mengakibatkan barang-barang impor, seperti bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi lebih mahal dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang di dalam negeri. Selain itu, melemahnya nilai tukar mengakibatkan semakin besarnya kewajiban

[57] Iskandar Simorangkir, *Sistem dan kebijakan Nillai Tukar* (Jakarta: Rajawali, 2004), 1.

hutang luar negeri perusahaan-perusahaan sehingga neraca perusahaan dan bank-bank memburuk.[58]

Perubahan kurs mata uang juga akan sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah. Jika nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah. Hasil riset BI (2002) menunjukkan bahwa jika suatu negara memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing dalam jumlah yang besar, baik itu dilakukan oleh bank, lembaga keuangan, ataupun nasabah bank maka kondisi tersebut telah menyebabkan sistem keuangan secara keseluruhan rentan terhadap gejolak nilai tukar. Penurunan rupiah terhadap valuta asing menyebabkan pinjaman dalam mata uang asing meningkat nilainya secara relatif sesuai dengan penurunan tersebut.[59] Peningkatan jumlah kewajiban tersebut berdampak pada kemampuan membayar kewajiban yang semakin menurun, bahkan banyak kasus mengakibatkan ketidakmampuan membayar dan meningkatkan besaran NPF.

Perkembangan nilai tukar sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi, dimana ketika semakin tingginya jumlah mata uang lokal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 Dollar akan meningkatkan potensi semakin tingginya rasio NPF. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pelemahan kondisi ekonomi secara umum, dan juga disebabkan oleh besarnya tingkat pinjaman yang ditanggung oleh debitur yang bergerak di

[58] Ibid, 2.
[59] N. Gregory Mankiw, , *Makroekonom*i (Jakarta: Erlangga, 2006.), 124.

bidang bisnis perdagangan internasional maupun perusahaan yang harus memasok bahan baku yang dibayar dengan Dollar. Beban perusahaan akan menjadi semakin besar dan memperbesar peluang tingginya risiko pembiayaan bermasalah (NPF) atas pinjaman yang diperoleh dari bank.[60]

B. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tabrizi menunjukkan bahwa secara parsial PDB dan nilai kurs berdampak positif terhadap NPF sedangkan inflasi berdampak negatif. Sedangkan secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh positif terhadap NPF.namun dalam penelitian ini hanya menggunakan regresi sederhana sehingga tidak dapat membandingkan dampak jangka panjang variabel makroekonomi terhadap NPF. [61]

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Widokartiko, Noer Azam Achsani, dan Irfan Syauqi Beik tentang, 1) menganalisis dan mengukur pengaruh variabel kinerja internal perbankan konvensional dan syariah terhadap profitabilitas; 2) menganalisis dan mengukur pengaruh variabel makro ekonomi memengaruhi profitabilitas pada perbankan konvensional dan syariah. Hasil yang didapatkan menunjukkan dan menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki profitabilitas yang lebih stabil dalam menanggapi kondisi ekonomi makro dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Respon dari profitabilitas terhadap pengaruh pergerakan

[60] Berto Usman dan Kamaludin Darmansyah. *Determinan Non Performing Loan (NPL) Pada Industri Perbankan* (Bukti Empiris Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia, 2015). 550.

[61] Ahmad Tabrizi, "Analisis Variabel Makro Terhadap Non Performing Finance Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2005-2013", *Tesis* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

variabel makro ekonomi dapat disimpulkan bahwa dalam kurs dan inflasi hanya perbankan syariah yang dapat cepat stabil. [62]

Penelitian yang dilakukan oleh Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini yang mencoba mendeteksi faktor-faktor penentu kredit macet dengan sampel dari 85 bank di tiga negara (Italia, Yunani dan Spanyol) untuk periode 2004-2008. Dimana negara-negara ini telah menghadapi masalah keuangan setelah krisis subprime pada 2008. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan pengembalian aset lembaga kredit memiliki dampak negatif pada kredit macet. Tingkat pengangguran dan tingkat bunga riil mempengaruhi kredit macet secara positif. [63]

Penelitian yang dilakukan oleh Vikky Riannasari yang mencoba menguji dan menganalisis NPF golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia. Hasil penelitian yang diuji menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa *Equivalent Rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF, CAR, Kurs, Inflasi dan BBM berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. [64]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Harahap yang ingin melihat seberapa besar pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah/Kurs, Suku Bunga/BI Rate dan Margin Bagi Hasil/*Rate Of profit* terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji

---

[62] Bayu Widokartiko dkk. "Dampak Kinerja Internal dan Kondisi Makro Ekonomi, 161-171

[63] Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini," Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans", *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 3, No. 4, 2013.

[64] Vikky Riannasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF (Non Performing Financing) Berdasarkan Golongan Pembiayaan Pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Di Indonesia (Tahun 2009-2016)", *Tesis* (UII Jogjakarta, 2017)

menyatakan bahwa variabel bebas (Inflasi, Nilai Tukar/ Kurs, Suku Bunga/ BI Rate dan Margin Bagi Hasil) mampu menjelaskan variabel terikat NPF sebesar 85%. Secara parsial variabel Nilai Tukar/ Kurs memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF dan variabel Suku Bunga/BI Rate dan Margin Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF sedangkan variabel Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. [65]

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Tabrizi (2014)	Analisis pengaruh variabel makro terhadap *non performing financing* bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2005-2013	Sama-sama menggunakan variabel makro dan menjadikan bank umum syariah sebagai objek	Hanya menggunakan regresi linear sederhana sehingga hanya menguji pengaruh jangka pendek.
2	Bayu Widokartiko, Noer Azam Achsani, dan Irfan Syauqi Beik	Dampak kinerja internal dan kondisi makro ekonomi terhadap Profitabilitas pada perbankan	Sama-sama menggunakan metode dinamis *Granger kausalitas* dan *Vector Auto regresif (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM)* sebagai alat analisis data	Variabel dependen adalah profitabilitas bukan NPF

[65] Muhammad Arfan Harahap, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Syariah", *Tesis* (UIN Sumatera Utara, 2016)

No.	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini (2013)	*Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans*	Sama-sama menguji variabel makro	Hanya menggunakan regresi linear sederhana sehingga hanya menguji pengaruh jangka panjang.
4	Vikky Riannasari (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF (*Non Performing Financing*) Berdasarkan Golongan Pembiayaan Pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Di Indonesia (Tahun 2009-2016)	Sama-sama menggunakan variabel makro (kurs dan inlasi)	Objek yang diuji adalah BPRS
5	Muhammad Arfan Harahap (2017)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah	Sama-sama menggunakan variabel makro (kurs dan inlasi)	Hanya menggunakan regresi linear sederhana sehingga hanya menguji pengaruh jangka pendek. Terbatas melakukan uji pengaruh tanpa memperhatikan gejolak variabel makro dan seberapa cepat pengaruh itu terdeteksi

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara sektor makroekonomi dan perbankan. Beberapa variabel makro yang diduga berpengaruh kuat terhadap kesehatan perbankan yang dalam hal ini diukur dengan NPF adalah PDB, inflasi dan kurs. Pertama, ketika PDB meningkat maka bisa dikatakan pendapatan rata-rata masyarakat negara tersebut juga meningkat, ketika ekonomi meningkat maka daya beli masyarakat ikut meningkat sehingga produsen akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pada akhirnya risiko gagal bayar terhadap pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat ditekan.

Kedua, Melemahnya Rupiah akan sangat berpengaruh pada usaha nasabah khusunya yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor, dampak secara langsungnya adalah meningkatnya kewajiban hutang dan tingginya harga barang-barang impor. Meningkatnya pengeluaran nasabah inilah yang pada akhirnya menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Ketiga, Tingginya inflasi akan menyebabkan pengeluaran masyarakat ikut meningkat jika dibandingkan dengan keadaan normal. Meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat ini berbanding terbalik dengan kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya karena dana yang dimiliki akan dialokasikan untuk kebutuhan yang lain.

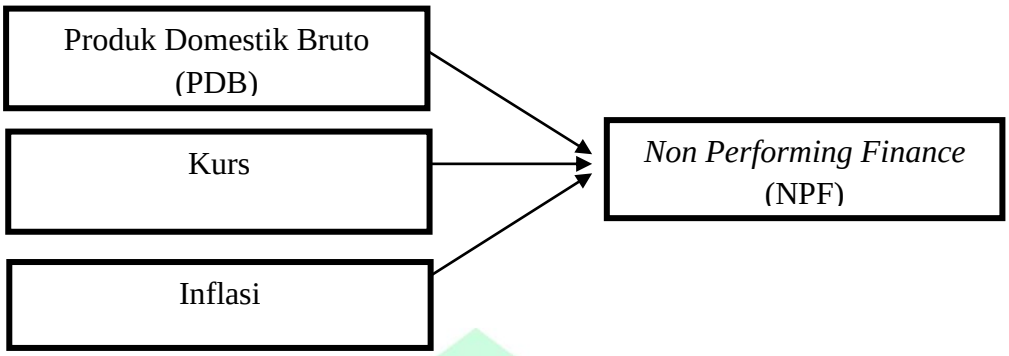

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada teori yang ada dan penelitian terdahulu, maka hipothesis yang akan di uji untuk mengetahui kebenarannya adalah:

1. H1 = Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. H0 = Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. H1 = Kurs berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. H0 = Kurs tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. H1 = Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

6. H0 = Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

IAIN
PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[66]

Jenis metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam populasi.[67] Agar pelaksanaan penelitian terarah dengan baik, maka perlu dibuat rancangan penelitian sebagi pedoman sebagai berikut[68]:

PONOROGO

[66]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 13.

[67]Ibid., 7.

[68]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 177.

1. Rancangan pertama

   Persiapan dan perumusan, meliputi: pengumpulan data, penentuan ruang lingkup dan objek penelitian, perumusan masalah dan tujuan, penetapan hipotesis, penetapan metode penelitian dan alat analisis.

2. Rancangan kedua

   Operasional, meliputi: pengumpulan data, menyusun data sebelum dilakukan analisis, pengolahan data, laporan hasil penelitian.

3. Rancangan ketiga

   Penyimpulan, meliputi: pembahasan dan menyusun hasil penelitian, menyimpulkan penelitian.

4. Rancangan keempat

   Penyelesaian, meliputi: testing dan kontrol, penulisan laporan penelitian.

5. Rancangan kelima

   Penyelesaian dan penyerahan, meliputi: penulisan laporan penelitian, pencetakan atau publikasi, penyerahan hasil penelitian kepada yang berhak.

B. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di negara Indonesia melalui website masing-masing bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang berjumlah 13 bank. Periode pengamatan dilakukan selama 9 tahun (2009-2018) berdasarkan data kuartal.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubunganya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya.[69] Tanpa operasional variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Berikut ini penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel dependen

   Variabel dependen (variabel Y) yaitu : variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah *Net Performing Finance* (NPF)

   Rasio data NPF diperoleh dengan membagikan jumlah pembiayaan kurang lancar diragukan dan macet dengan total pembiayaan kemudian dikalikan 100%

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (kl, d, m)}{Total\ pembiayaan} x\ 100\%$$

2. Variabel independen

[69] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67.

Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan nilai kurs.

a. Data PDB berasal dari bank Indonesia yang diterbitkan setiap kuartal.
b. Data inflasi berasal dari indeks harga yang digunakan oleh BPS untuk menghitung pergerakan inflasi dari setiap komoditasnya, data inflasi yang digunakan adalah data inflasi kuartal.
c. Data kurs yang digunakan adalah kurs tengah, merupakan kurs yang digunakan untuk mencatat nilai konversi mata uang asing.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dengan mengunduh dari website resmi masing masing institusi.

1. Data *non performing finance* (NPF) dari statistik perbankan syariah ang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), www.ojk.go.id
2. Data Produk Dosmetik Bruto (PDB) dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id
3. Data kurs dari Bank Indonesia (BI), www.bi.go.id

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Variabel Makroekonomi Pada Model Regresi Dinamis

a. *Auto Regressive Distributed Lag Models* (ARDL).

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu *Auto Regressive Distributed Lag Models* (ARDL). Regresi yang

menggunakan data time series yang tidak stasioner kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung terjadi jika nilai koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan keduanya yang merupakan data time series hanya menunjukkan tren saja. Jadi tingginya koefisien determinasi karena tren bukan karena hubungan antar keduanya .

Penelitian yang menggunakan data runtut waktu, kerap menggunakan model dinamis sebagai alat analisis untuk mengatasi kendala stasioneritas. Salah satunya adalah ARDL (*Autoregressive-Distributed Lag*). ARDL adalah model regresi kuadrat terkecil yang mengkombinasikan selang waktu dari variabel independen (model *distributed-lag*) sekaligus juga selang waktu dari variabel dependen (model *autoregresif*). Salah satu keunggulan yang dimiliki ARDL dibanding model dinamis lainnya adalah ARDL tidak mengharuskan setiap variabel memiliki stasioneritas yang setara pada tingkat level ataupun tingkat 1-difference (walaupun estimasi menggunakan ARDL sudah tidak dapat dilakukan apabila variabel stasioner pada 2-difference).

b. Uji Stasioneritas Data

Model ARDL sebenarnya tidak mensyaratkan uji stasioneritas pada data, akan tetapi dalam uji ARDL data tidak boleh stasioner pada

2nd diff. Data time series dikatakan stasioner apabila data tersebut tidak mengandung akar-akar unit (*unit of root*) yaitu dimana nilai rata-rata (*mean*), variannya (*variance*) konstan sepanjang waktu pengamatan dan kovarians (*covariance*) antara dua data *time series* hanya bergantung pada kelambanan antara dua periode waktu tersebut[70]. Secara statistik dinyatakan sebagai berikut:

$E(Y_t) = \mu$ rata-rata dari Y konstan (3.1)

$var(Y_t) = E(Y_t - \mu)^2 = \sigma^2$ varian dari Y konstan (3.2)

$Y_k = E(Y_t - \mu)(Y_{t+k} - \mu)$ kovarian (3.3)

Begitu sebaliknya, data *time series* dikatakan tidak stasioner jika mengandung akar-akar unit yang menyebabkan data tidak dapat dianalisis pada setiap waktu, atau terdapat pengaruh waktu (waktu tidak independen) pada data tersebut. Data yang tidak stasioner jika diregresikan akan meningkatkan kemungkinan keberadaan hubungan kointegrasi antar variabel, dimana nilai koefisien yang dihasilkan dari regresi tersebut tidak valid (*spurious regression*). Uji stasioneritas dapat dilakukan (paling banyak) dengan pendekatan *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dan *Philips-Perron* (PP).

Penelitian ini menggunakan uji stasioneritas data dengan pendekatan *Philips-Perron* (PP). Perbedaannya dengan Dickey Fuller (DF) adalah bahwa pendekatan dengan DF mengasumsikan bahwa variabel gangguan e_t bersifat independen dengan rata-rata nol, varians

[70] Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, 335.

yang konstan dan tidak saling berhubungan (*non-autokorelasi*). Penggunaan PP membuat uji akar unit dengan mengggunakan metode statistik nonparametrik dalam menjelaskan adanya autokorelasi antara variabel gangguan e_t tanpa memasukkan variabel penjelas kelambanan diferensi sebagaimana pada uji ADF.[71] Adapun uji akar unit dengan pendekatan PP adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + e_t \quad (3.4)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + e_t \quad (3.5)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 + \gamma Y_{t-1} + e_t \quad (3.6)$$

dimana T = adalah tren waktu

Statistik distribusi t tidak mengikuti statistik distribusi normal tetapi mengikuti distribusi statistik PP, sedangkan nilai kritisnya digunakan nilai kritis yang dikemukakan oleh Mackinnon. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai kritisnya yaitu distribusi statistik Mackinnon. Nilai statistik PP ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien γY_{t-1} pada persamaan (3.4) sampai (3.6). Jika nilai absolute statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya maka data yang diamati stationer dan jika sebaliknya maka data tersebut tidak stasioner.

c. Uji Kointegrasi (*Bound Test Cointegration*)

[71] Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, 335.

Regresi yang menggunakan data time series yang tidak stasioner kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung terjadi jika nilai koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan keduanya yang merupakan data time series hanya menunjukkan tren saja. Jadi tingginya koefisien determinasi karena tren bukan karena hubungan antar keduanya.[72]

Uji kointegrasi pada estimasi ARDL dilakukan dengan *Bound Test Cointegration,* Metode ini memiliki keunggulan karena tidak mempermasalahkan variabel-variabel yang terdapat pada model bersifat I(0) atau I(1). Melalui metode *Bounds Testing Cointegration* menunjukkan pendekatan ARDL akan menghasilakn kooefisien jangka panjang dengan estimasi yang konsisten yang secara asimtotik normal[73]. Uji kointegrasi seperti *Engle-Granger* atau *Johansen*, kurang tepat dilakukan saat mengestimasi model ARDL karena kedua uji tersebut mengharuskan seluruh variabel stasioner pada ordo I (1).

Dalam penelitian ini menggunakan uji *Bound Test Cointegration* dilakukan dengan cara mengestimasi persamaan umum ARDL yang menggunakan semua variabel independennya secara

[72] Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, 336.*

[73] M. H. Pesaran, Shin, Y., & Smith, R. J. "Bounds testing approaches to the'analysis of level relationships", *Journal of Applied Econometrics* , 16(3), 2001, 289.

bergantian. Dimana nilai F-statistik yang di dapat akan dibandingkan dengan nilai Bound Test I(0) dan I(1).

Langkahnya sebagai berikut ;

Hipotesis ;

Ho = Data tidak ada kointegrasi.

Ha = Data ada kointegrasi.

Pengambilan keputusan kriterianya yaitu ;

1) Apabila nilai F-statistik Value lebih kecil dari I(I) Bound, maka menerima Ho jadi data tidak ada kointegrasi atau tidak terdapat hubungan dalam jangka panjang.
2) Apabila nilai F-statistik Value lebih besar dari dari I(I) Bound, maka menolak Ho jadi data ada kointegrasi atau ada hubungan dalam jangka panjang.

d. Uji Asumsi Klasik

Agar model ARDL yang diestimasi dapat terhindar dari pelangggaran asumsi-asumsi dasar ekonometri maka perlu dilakukan uji diagnosis. Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga uji yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance.[74]

Cara pengambilan keputusan ada tidaknya gejala multikoliniearitas adalah dengan melihat nilai tolerance. Jika nilai tolerance dibawah 10 maka model regresi tidak terdapat gejala multikoloniearitas, dan sebaliknya jika nilai tolerance diatas 10 maka model regresi terdapat gejala mulitkolonieritas..[75]

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.[76] Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji *Durbin - Watson* (DW Test). Ketentuan dalam pengujian *Durbin Watson* adalah sebagai berikut[77]:

a) Angka D-W dibawah - 2 berarti ada autokorealasi positif

PONOROGO

[74] Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 105.

[75] Ibid, 108.

[76] Ibid, 110.

[77] Hermanto dan Endah Saptuningsih, *Electronic Data Processing SPSS 10 dan Eviews 3.0*. (UPFe. UMY, 2002), 59.

b) Angka D-W diantara - 2 sampai + 2, berarti tidak ada autokorealasi

c) Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.[78] Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas, atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan heteroskedasticity test white, dengan melihat probabilty R-Squared[79]

Jika prob < 0,05 terjadi heteroskedastisitas

Jika prob > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas

e. Model ARDL

Sebagian besar analisis ekonomi berkaitan dengan analisis runtun waktu, yang diwujudkan oleh hubungan antara perubahan suatu besaran ekonomi terhadap gejala dan perilaku ekonomi diwaktu lain. Hubungan ekonomi tersebut dirumuskan dengan model linear dinamis. Pada dasarnya model linear dinamis lebih ditekankan pada struktur

[78]Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, 139.
[79]Ibid.

dinamis jangka pendek. Akan tetapi teori ekonomi tidak hanya bercerita tentang model dinamis saja banyak peneliti terkecoh dengan sindrom R^2, dimana tinggi R^2 hasil estimasi terkena regresi lancung. Berhubungan dengan hal tersebut ada 2 metode untuk menghindari regresi lancung, yaitu:

1) Tanpa uji stasioneritas data, yaitu dengan membentuk linear dinamis seperti model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), *Partial Adjusment Model* (PAM), *Buffer Stock Model* (BSM) dan lain-lain.
2) Dengan menggunakan uji stasioneritas atau menggunakan pendekatan kointegrasi (*cointegration approach*)

Hubungan jangka panjang (kointegrasi) pada persamaan dapat diuji dengan menggunakan metode *Engle Granger* dan *Vector Error Correction Model* (VECM). Namun pada penelitian ini metode ARDL yang dikembangkan oleh Pesaran, Shin, dan Smith (2001) dipilih karena memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. Pertama, metode ini memiliki prosedur yang cukup sederhana, dimana dapat diaplikasikan pada jumlah sampel yang kecil sehingga uji bound dapat diterapkan. Kedua, ARDL mengestimasi komponen jangka pendek dan jangka panjang secara simultan dan menghilangkan masalah yang timbul terkait dengan autokorelasi dan *omitted variable*. Ketiga, model ARDL adalah estimator dari koefisien jangka panjang yang bersifat super konsisten dan inferensi yang valid terhadap

koefisien jangka panjang yang dibuat menggunakan teori standar normal asimptotik. Keempat, uji Wald atau uji F statistic yang digunakan pada uji bound memiliki distribusi non-standar dengan hipotesis nol tidak adanya kointegrasi tanpa memperdulikan variabel yang diuji memiliki akar unit I(0) dan atau I(1) atau saling terkointegrasi serta tidak harus memiliki derajat integrasi yang sama. Kelima, ARDL mampu menghasilan estimasi yang tidak bias dari model jangka panjang dan statistik t yang valid meskipun beberapa variabel merupakan variabel endogen. Keenam, setelah jumlah lag ditentukan dalam ARDL, estimasi kointegrasi dapat dilakukan menggunakan metode sederhana ordinary least square (OLS).[80]

Model ARDL adalah model yang memasukkan variabel bebas masa lalu, baik itu variabel bebas masa lalu maupun variabel terikat masa lalu dalam analisis regresinya. Ketergantungan antar variabel dependen terhadap variabel independen sangat sukar ditemui dalam keadaan konstan, seringkali variabel independen merespon variabel dependen dengan jeda waktu tertentu atau disebut sebagai lag.[81]

Variabel dependen Y merespon untuk variabel independen X dengan jarak waktu atau *lag*. Lag dapat terjadi karena beberapa alasan yang mendasarinya,[82] yaitu:

[80] M. H. Pesaran, Shin, Y. & Smith, R. J., Bounds testing approaches, 326.
[81] Ibid.
[82] Damodar N Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2010), 216.

(1) Alasan psikologis, sebagai hasil dari efek kebiasaan, masyarakat tidak mengubah kebiasaan konsumsinya secara tiba-tiba mengikuti penurunan harga atau kenaikan penghasilannya, karena proses perubahan melibatkan beberapa perubahan yang cepat.

(2) Alasan teknologi, mendorong orang untuk menunda atau menahan konsumsinya saat ini, agar memperoleh barang dengan harga yang relatif murah akibat adanya perubahan atau penerapan teknologi baru dalam proses produksinya.

(3) Alasan institusi, faktor tersebut turut berkontribusi terhadap selang waktu karena menyangkut urusan administrasi dan perjanjian yang menyebabkan keputusan dapat diambil setelah berakhirnya periode kontrak atau perjanjian tersebut.

Model yang digunakan dalam metode ARDL untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang adalah sebagai berikut:

$$NPFt = \beta 0+\beta 1NPF_{t-1}+.....+ \beta pNPF_{t-P}+\alpha PDB_t+\alpha 1PDB_{t-1}+.....\alpha qPDB_{t-q} +\rho KURS_t + \rho 1KURS_{t-1}+.....\rho rKURS_{t-r} + \delta INFLASI_t + \delta 1INFLASI_{t-1}+.....\delta sINFLASI_{t-s}+ \varepsilon t$$

f. Uji stabilitas model (*CUSUM Test*)

Untuk menentukan validitas model dalam metode ARDL perlu dilakukan beberapa tes diagnostik untuk menentukan validitas model dan variabel. Uji stabilitas digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pada metode ARDL, *CUSUM test* digunakan untuk mengukur stabilitas

koefisiensi dan untuk menentukan apakah ada *structural break*[83] dalam model sebagai hasil analisis. Uji CUSUM ini didasarkan pada nilai komulatif dari jumlah recursive residual. Nilai komulatif recursive residual ini kemudian kita plot dengan band berupa garis kritis 5%. Sebagaimana metode recursive residual, jika nilai komulatif recursive residual ini berada di dalam band maka mengindikasikan adanya kestabilan parameter estimasi di dalam periode penelitian. Sebaliknya jika nilai komulatif recursive residual berada di luar band berarti menunjukkan adanya ketidakstabilan parameter di dalam periode penelitian.[84]

IAIN PONOROGO

[83] Perubahan tak terduga dari waktu ke waktu dalam parameter model regresi yang dapat menyebabkan kesalahan besar dalam peramalan dan tidak dapat diandalkannya model secara umum.

[84] Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, 177*.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

F. Analisis Deskriptif

1. Perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan bermasalah atau NPF pada Bank Umum Syariah yang merupakan salat satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank, artinya semakin tinggi persentase angka NPF semakin tidak sehat kondisi likuiditas bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15,[85] bank dikatakan tidak sehat jika rasio NPF lebih dari 5%. Pada masa periode penelitian 2009 Q1-2018 Q4, angka NPF cenderung fluktuatif.

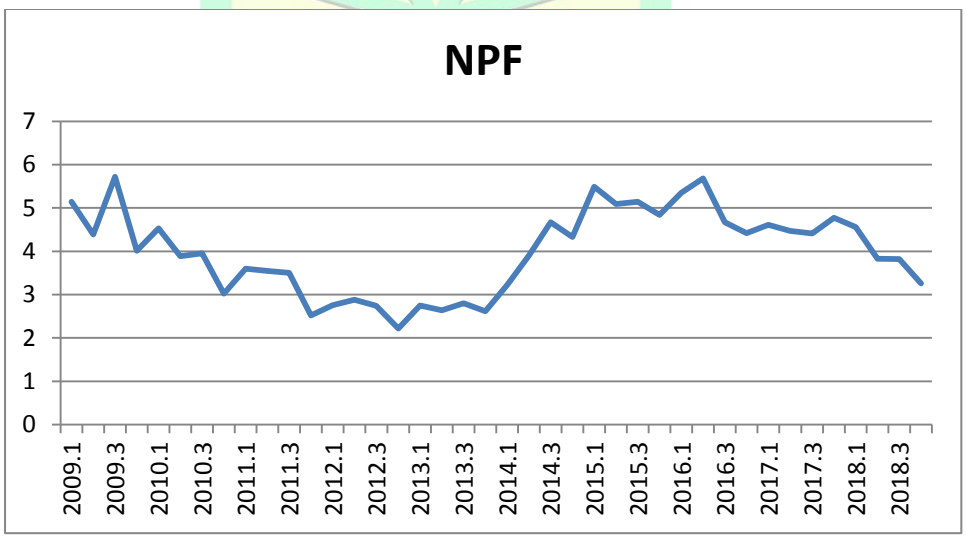

Gambar 4.1. NPF Bank Umum Syariah 2009-2018

Sumber: OJK (data diolah)

[85] Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa angka NPF beberapakali menyentuh angka lebih dari 5%. Dimulai tingginya NPF pada awal periode penelitian, yaitu membengkaknya angka NPF yang mencapai angka 5,72% pada quartal ke III 2009 merupakan dampak memburuknya perekonomian Indonesia pasca terjadinya krisis global yang berawal dari Amerika Serikat pada tahun 2008. Belajar dari pengalaman ini pada tahun-tahun berikutnya menjaga stabilitas keuangan menjadi prioritas bagi bank sentral di setiap negara termasuk Indonesia, yang hasilnya dapat dilihat dengan membaiknya angka NPF pada tahun-tahun berikutnya, sampai angka terendah 2.22% pada quartal ke IV 2012. Namun pada tahun 2015 perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia dibarengi oleh meningkatnya risiko kredit perbankan. Iklim bisnis yang makin tak kondusif ini kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah perbankan mengalami kenaikan kembali. Tercatat pada quartal ke II tahun 2016 angka NPF menyentuh 5.68%.. Tingginya NPF perbankan syariah didominasi dari sektor perdagangan yang mencapai Rp 2,29 triliun per Juli 2016. NPF di sektor perdagangan meningkat sebesar 43,77% secara tahunan. Secara total, nilai pembiayaan bermasalah perbankan syariah mencapai Rp 10,81 triliun atau naik 8,36% dari Rp 9,98 triliun pada Juli 2015.

Pada periode beberapa tahun terakhir NPF bank umum syariah menunjukkan trend ke arah yang lebih baik. Tercatat di akhir 2018 NPF berada pada 3.26% turun 1.51% dibandingkan pada akhir 2017 yang masih

mencapai 4.77% atau hampir mencapai level tidak sehat. Bila dirinci, penurunan ini datang dari membaiknya kualitas pembiayaan BUS. Tercatat total pembiayaan bermasalah tahun lalu mencapai Rp 6,59 triliun menurun dari Rp 9,03 triliun dari periode 2017 atau susut 26,94% secara *year on year* (yoy)[86]. Namun ke depan, tantangan pembiayaan bermasalah bagi bank khususnya perbankan bakal semakin lebar. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang harus diwaspadai mulai dari dinamisme kondisi usaha, faktor internal maupun eksternal debitur hingga disrupsi persaingan pasar yang melebar dengan hadirnya *e-commerce* dan *fintech*[87].

2. Perkembangan Produk Dosmetik Bruto (PDB)

PDB sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Antara tahun 2009 sampai 2018 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir 5.5 persen. Artinya angka PDB terus meningkat kecuali pada tahun 2009-2010 yang turun akibat guncangan dan ketidak jelasan finansial global. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis menjadi 4.6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6.6 persen.[88]

PONOROGO

[86] Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah januari 2019 (*www.ojk.go.id). 9.
[87] *Financial technology* (inovasi di bidang jasa keuangan)
[88] https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/gross-domestic-product

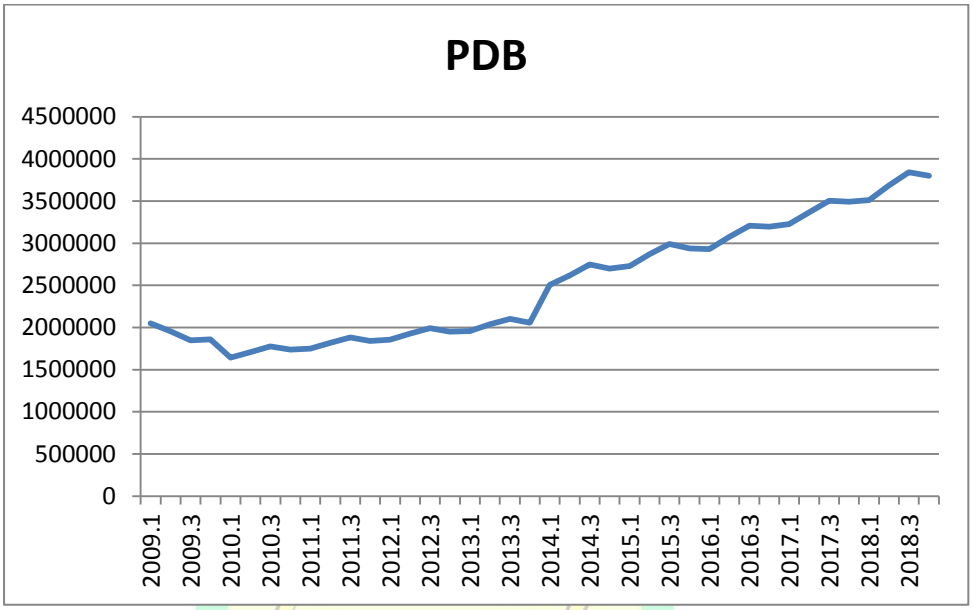

Gambar 4.2. Produk Dosmetik Bruto (PDB) Indonesia

Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pasca krisis keuangan global pada tahun 2008 kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan, sampai pada angka terendah Rp. 1.709 triliun pada quartal II 2010. meskipun periode setelahnya kondisi ekonomi sempat memuncak pada tahun 2011, pertumbuhan PDB Indonesia mulai melambat pada periode 2011-2015. Ada beberapa faktor yang menjelaskan sebab perlambatan tersebut. Pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi global khususnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara tidak langsung memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, hal itu tidak lepas karena kedua negara merupakan mitra dagang yang penting (RRT menyumbang hampir sepersepuluh dari keseluruhan ekspor Indonesia).[89]

[89] https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?

Kedua, menurunnya harga-harga komoditas akibat turunnya permintaan global dan timbunan suplai akibat banyaknya perusahaan yang aktif di sektor komoditas karena ada anggapan bahwa ekonomi global akan segera tumbuh. Ketiga, akibat tingginya suku bunga Bank Indonesia pertumbuhan kredit menjadi terbatas dan karenanya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Keempat, pada tahun 2014 kondisi perpolitikan yang dilanda ketidak jelasan akibat pemilu presiden dan legislatif menyebabkan ketidakpastian hukum atau ketidakpastian mengenai kebijakan (ekonomi) membuat investasi di Indonesia melambat. Kelima, akibat melemahnya konsumsi rumah tangga karena masyarakat lebih memilih menghemat dana dengan menabung di bank daripada membelanjakannya.[90]

Kondisi ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif setiap tahunnya, bahkan pada quartal III 2018 PDB Indonesia mencapai angka Rp. 3.841 triliun tertinggi dalam lima tahun terakhir. kondisi global yang lebih kondusif serta stabilitas makroekonomi yang terjaga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi global yang cukup solid, baik di negara maju maupun negara berkembang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan kenaikan harga komoditas meningkatkan kinerja ekspor terutama yang berbasis komoditas. Selanjutnya, peningkatan ekspor dan dorongan stimulus fiskal melalui belanja infrastruktur secara

[90] Ibid.

perlahan turut meningkatkan keyakinan korporasi untuk melakukan investasi.

Meskipun ekonomi Indonesia dari tahun ketahun terus tumbuh dikisaran 5%, akan tetapi ini belum sesuai dengan apa yang di gadang-gadang oleh pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 7%. Hal ini terjadi karena ketika pemerintah menetapkan angka tersebut, kondisi ekonomi global masih meyakinkan. Sayangnya, perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini justru berbalik arah dan memberikan ketidakpastian terhadap ekonomi negara-negara lain. Akan tetapi pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi tak sekadar berpatok pada angka, tetapi berdampak bagi masyarakat. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, pemerintah bisa memperbaiki indikator ekonomi lain. Misalnya, lapangan kerja tercipta, pengangguran berkurang, investasi meningkat, hingga tingkat kemiskinan yang berkurang hingga satu digit sebesar 9,82 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. Karena harapanya ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tapi juga berkualitas.[91]

3. Perkembangan Kurs

Nilai tukar atau kurs merupakan indikator ekonomi yang sangat penting karena pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap aspek perekonomian suatu negara. Apalagi saat ini perkembangan sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka antar negara, maka penting

[91] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829203858-532-326016/alasan-pemerintah-target-ekonomi-7-persen-jokowi-tak-tercapai

untuk menjaga kestabilan angka kurs. Pentingnya peranan nilai tukar mata uang bagi suatu negara, mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk menjaga posisi kurs mata uang suatu negara berada dalam keadaan yang relatif stabil.

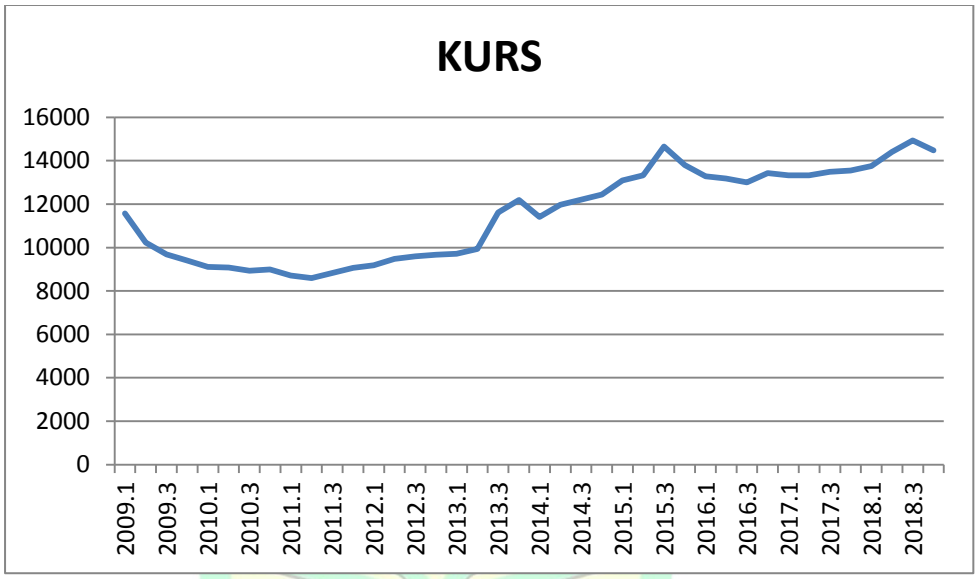

Gambar 4.3 Pergerakan Nilai Kurs Rupiah (IDR) Terhadap Dolar Amerika (USD) Periode tahun 2009 – 2018

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 4.3 terlihat bahwa nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dollar Amaerika (USD) dari tahun 2009 - 2018 mengalami fluktuasi. Paska krisis ekonomi global pada tahun 2008 nilai rupiah mengalami depresiasi hingga mencapai nilai Rp. 11.575 per Dollar Amerika (USD) dan hal ini tidak lepas dari krisis *mortgage subprime* yang melanda perekonomian Amerika Serikat dan tingginya harga minyak dunia. Namun pada periode-periode setelahnya nilai rupiah terus menguat seiring membaiknya kondisi ekonomi.

Semenjak pertengahan tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014, terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang cukup siginifi kan. Perbandingan nilai tukar pada akhir dan awal tahun 2013 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah terdepresiasi sekitar 26%. Sebagian besar analis menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dipicu oleh kebijakan tapering (pengurangan stimulus kebijakan *Quantitative Easing*) oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan defisit transaksi berjalan yang terjadi mulai tahun 2012. Sampai dengan akhir 2013, transaksi berjalan masih mencatat defisit sebesar 2 persen terhadap PDB.[92]

Pada beberapa tahun terakhir kurs belum menunjukkan tanda-tanda kearah yang positif, bahkan pada quartal III 2018 nilai tukar rupiah terhadap dolar hampir menyentuh angka 15 ribu. Fluktuasi nilai tukar rupiah belakangan ini patut dicermati. Jika rupiah terus melemah, efek beruntunnya harus diperhatikan oleh para investor dan pengambil kebijakan ekonomi Indonesia. Tercatat paling tidak ada empat hal yang menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah[93]:

a. Masih tingginya ketergantungan impor barang dan penggunaan jasa dari luar negeri, yang menyebabkan permintaan dolar dalam negeri meningkat.

[92] Anang Budi Gunawan, "Fundamental Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika", *jurnal Bappenas* edisi 01 tahun xx mei 2014,

[93] https://www.moneysmart.id/penyebab-rupiah-melemah/

b. Masih tingginya angka utang luar negeri, karena untuk membayarnya harus menggunakan mata uang yang disepakati bersama yaitu dolar.

c. Menguatnya ekonomi Amerika Serikat, Melihat ekonomi AS yang cenderung menguat bank sentral AS atau *Federal Reserve System* (FED) menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, banyak investor atau pemilik modal menukarkan uangnya ke Dolar buat diinvetasikan di Amerika Serikat.

d. Melemahnya ekonomi China, ketika ekonomi melemah China menurunkan impor dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Akibatnya, penukaran Yuan China ke Rupiah menurun.

4. Perkembangan Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian tergantung parah atau tidaknya inflasi. Inflasi merupakan masalah klasik bagi perekonomian yang hingga saat ini masih memberikan trauma mendalam. Menurut sejarah perkembangannya, fluktuasi inflasi Indonesia tergolong cukup bervariasi dari waktu ke waktu dan bersifat *persisten.*

PONOROGO

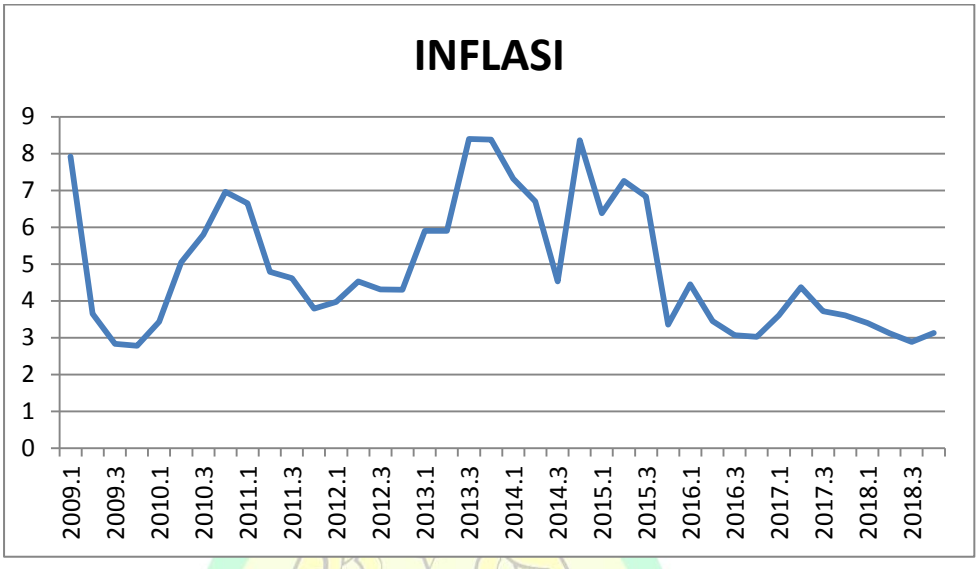

Gambar 4.4 Laju Inflasi Indonesia 2009-2019

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 4.4 menunjukkan tingginya angka inflasi di awal periode penelitian, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, pada quartal ke II 2009 angka inflasi sudah kembali kepada trend positif diangka 3.65%.

Perkembangan inflasi di Indonesia yang memiliki hasil fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu dari waktu ke waktu. Kenaikan inflasi di Indonesia di sebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya tingkat impor, membengkaknya hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga mengakibatkan ke

stabilan perkonomian Indonesia melemah dan memyebabkan barang-barang atau jasa di pasar menjadi naik.

Inflasi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh karena gagalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor moneter. Tetapi, yang seringkali dilakukan adalah untuk menstabilkan fluktuasi tingkat harga umum dalam jangka waktu yang pendek. Dengan melakukan pembenahan di sektor riil secara tepat,bisa membawa kita sampai pada tahap *messo* dan *micro* ekonomi, sehingga fundamental perekonomian Indonesia dapat diperkokoh. Defisit APBN; peningkatan cadangan devisa; pembenahan sektor pertanian khususnya pada sub sektor pangan; pembenahan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang penting untuk dapat menekan laju inflasi ke tingkat yang serendah mungkin di Indonesia, disamping pembenahan di sektor moneter.

G. Analisis Statistik Data

1. Uji Stationeritas

Langkah awal yang harus dilakukan dalam estimasi model ekonomi dengan menggunakan data *time series* adalah dengan menguji stasioneritas data tersebut dengan uji akar unit (*unit root test*). Data yang stasioner artinya data tersebut memiliki nilai varians yang konstan sehingga memiliki kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Sekumpulan data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varian dari data *time*

series tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu.

Apabila data *time series* tidak stasioner, maka hasil regresi akan *spurious* (lancung atau palsu) dimana model memiliki nilai R^2 yang tinggi tetapi nilai durbin watson (DW) rendah. Nilai R^2 yang tinggi pada model regresi *spurious* tidak menunjukkan keterikatan antar variabel sesuai teori ekonomi melainkan dikarenakan terdapatnya kecenderungan (*trend*) yang kuat, sedangkan nilai DW yang rendah mengindikasikan adanya nilai residual yang tidak stasioner. Sebagian besar hasil regresi digunakan untuk melakukan peramalan (*forecasting*), apabila data bersifat non-stasioner maka hasil tersebut diragukan validitasnya.

Untuk menguji akar-akar unit pada penelitian ini digunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller.

Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	Uji Akar Unit			
	Level		1st Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
NPF	-2.140307	0.2307	-9.600385	0.0000
PDB	1.139624	0.9972	-5.706312	0.0000
KURS	-0.152667	0.9361	-7.958875	0.0000
INFLASI	-2.977128	0.0459	-5.720913	0.0000

Sumber: Hasil olah data eviews

Dalam metode ARDL uji unit root tidak harus bersifat stasioner pada tingkat difference yang sama (sebagaimana metode *Engle-Granger*

maupun *Johansen*), namun hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan stasioner pada tingkat level dan fisrt difference serta tidak terdapat variabel yang stasioner pada tingkat second difference. Pengujian akar unit dengan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) memberikan *output* stasioneritas data diringkas dalam Tabel 4.1. hasil uji ADF menunjukkan bahwa hanya inflasi yang stationer pada tingkat level ataupun. Sedangkan keseluruhan data, stasioner pada tingkat pertama atau *first difference* (1st Diff).

2. Uji Kointegrasi (*Bound Test Cointegration*)

Kointegrasi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk solusi data time series yang tidak stasioner. Khususnya untuk penelitian dengan pendekatan ARDL, metode uji kointegrasi *Bounds Testing Cointegration* digunakan untuk mengetahui adanya kointegrasi pada model sehingga dapat diketahui hubungan jangka panjang antar variabel dalam persamaan.

Table 4.2 *Bound Test Cointegration*

F-statistic Value	**8.546046**	
Significance	I0 Bound (Lower Bound)	I1 Bound (Upper Bound)
10%	2.72	3.77
5%	3.23	4.35
2.5%	3.69	4.89
1%	4.29	5.61

Sumber: Hasil olah data eviews

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa nilai F-Statistic Value > nilai I(0) dan I(1) yaitu 8.546046 > 2.72 dan 3.77 signifikan pada 10%.

Sehingga, maka Ho ditolak. Artinya dapat digunakan untuk mengetahui bahwa masing-masing model memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang, serta NPF, PDB, KURS dan Inflasi, telah stasioner

3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji *multikolinearitas*, uji *autokorelasi*, uji *heteroskedastisitas* dan uji *normalitas*. pengujian asumsi klasik tersebut bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak terdapat masalah penganggu sehingga data tersebut berdistribusi normal dan layak untuk diteliti. Berikut ini hasil rangkaian uji asumsi klasik dalam penelitian ini :

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*.[94]

Cara menguji ada tidaknya gejala multikoliniearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi tidak terdapat gejala multikoloniearitas, dan sebaliknya jika nilai VIF diatas 10 maka model regresi terdapat gejala mulitkolonieritas. Serta dengan melihat nilai

[94] Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 21, 105.

tolerence kurang dari 0,10 menunjukan adanya multikolonieritas. Jadi jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan tolerance lebih dari 0,10, maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas.[95] Dan untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikoliniearitas dalam model regresi maka perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients

	INFLASI	KURS	PDB
INFLASI	1.000000	-0.116690	-0.325595
KURS	-0.116690	1.000000	0.937783
PDB	-0.325595	0.937783	1.000000

Sumber: Data Output eviews (diolah)

Dari tabel 4.3 bisa dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih kecil dari 0,10. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model yang dipakai.

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.[96] Tehnik pengujian autokorelasi yang dipakai adalah metode *Durbin Watson*

[95] Ibid., 108.
[96] Ibid., 110.

(DW), adapun ketentuan dalam pengujian *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:[97]

a) Angka D-W dibawah - 2 berarti ada autokorealasi positif.

b) Angka D-W diantara - 2 sampai + 2, berarti tidak ada autokorealasi.

c) Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif.

Dan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) maka perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	0.33	0.28	0.96	0.71

a. Predictors: (Constant), PDB, kurs, inflasi
b. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data Output eviews (data diolah)

Berdasarkan dari output pada tabel 4.4 didapat nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari model regresi adalah 0,71, pada nilai DW ini diatara -2 sampai dengan 2, maka dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak terdapat auotokorelasi.

[97] Hermanto dan Endah Saptuningsih, *Electronic Data Processing SPSS 10 dan Eviews 3.0*, 59.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.[98] Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas, atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Table 4.5. *Hasil Uji Heterokedastisitas*

F-statistic	2.206278	Prob. F(9,30)	0.0504
Obs*R-squared	15.93092	Prob. Chi-Square(9)	0.0683
Scaled explained SS	8.831843	Prob. Chi-Square(9)	0.4529

Sumber: Hasil olah data eviews

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dengan melihat probabilitas Obs*R-squared, karena probabilitasnya 0,0683 > 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Estimasi *Auto-Regressive Distributed lag Models* (ARDL)

Setelah data lolos uji asumsi klasik kemudian dilakukan kombinasi lag yang optimal untuk memilih model ARDL terbaik dengan mengunakan seleksi Hannan-Quinn. Sementara itu, dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai R-Squared model ARDL tersebut relatif tinggi dengan nilai

[98] Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate*, 139.

rata-rata sekitar 0.83. Nilai R-Squared Adjusted sebesar 0.83 tersebut menunjukkan bahwa 83% variasi variabel terikat NPF mampu dijelaskan oleh masing-masing variabel bebas model ARDL yang terpilih.

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Model Jangka Pendek Model ARDL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
NPF(-1)	0.467642	0.112354	4.162220	0.0003
LOG(PDB(-1))	0.095702	2.424247	0.039477	0.9688
LOG(PDB(-2))	-3.647725	2.090846	1.744617	0.0920
LOG(KURS(-1))	-6.698888	3.086554	-2.170345	0.0386
LOG(KURS(-2))	9.354158	2.085092	4.486208	0.0001
INF(-1)	0.243666	0.078816	3.091580	0.0045

Sumber: Hasil olah data eviews

Dari hasil estimasi jangka pendek menggunakan model ARDL pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa masing-masing seluruh variabel independen (PDB, kurs dan inflasi) pada taraf koefisien dan probabilitas yang berbeda-beda.

1. Variabel PDB tidak berpengaruh signifikan pada lag 1 (0.9688) > 10%, artinya perubahan pada PDB satu quartal sebelumnya tidak langsung direspon dengan perubahan NPF pada periode berikutnya. sedangkan pada lag 2 variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dengan koefisien sebesar 3.647725 signifikan padal level 10%,

artinya dalam jangka pendek perubahan PDB mempengaruhi NPF akan tetapi membutuhkan jeda waktu (lag 2).

2. Variabel kurs pada lag 1 berpengaruh negatif (-6.698888) dan signifikan pada level 5%, sedangkan pada lag 2 berpengaruh positif (9.354158) dan signifikan pada level 1%.. Jika membandingkan tingkat signifikansi dari kedua lag maka hasil dari lag 2 lebih direkomendasikan untuk digunakan, artinya dalam jangka pendek perubahan PDB akan direspon positif dengan peningkatan NPF.
3. Variabel inflasi pada lag 1 berpengaruh positif (0.243666) dan signifikan pada level 1%, artinya dalam jangka pendek perubahan inflasi pada quarter sebelumnya akan direspon dengan peningkatan nilai NPF.

Tabel 4.7. Hasil Estimasi Model Jangka Panjang Model ARDL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
NPF(-1)	0.467642	0.112354	4.162220	0.0003
LOG(PDB)	-3.853562	1.841512	-2.092607	0.0456
LOG(KURS)	0.237824	2.528304	0.094065	0.9257
INF	-0.044889	0.075802	-0.592191	0.5585

Sumber: Hasil olah data eviews

Dari hasil estimasi jangka panjang menggunakan model ARDL pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hanya variabel PDB yang berpengaruh

signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel kurs dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

1. Variable PDB berpengaruh negatif (-3.853562) dan signifikan pada level 5% terhadap NPF. Artinya dalam jangka panjang peningkatan pada angka PDB direspon dengan menurunnya persentase NPF.
2. Variable kurs dalam jangka panjang kurang berpengaruh pada NPF, angka koefisien (0.237824) tidak diikuti dengan tingkat signifikansi 10%, 5% atau 1%.
3. Variable inflasi dalam jangka panjang kurang berpengaruh pada NPF, angka koefisien (0.237824) tidak diikuti dengan tingkat signifikansi 10%, 5% atau 1%.

5. Uji Stabilitas Model

Untuk menentukan validitas model dalam metode ARDL perlu dilakukan beberapa tes diagnostik untuk menentukan validitas model dan variabel. Pada metode ARDL, CUSUM test digunakan untuk mengukur stabilitas koefisiensi dan untuk menentukan apakah ada *structural break* dalam model sebagai hasil analisis.

PONOROGO

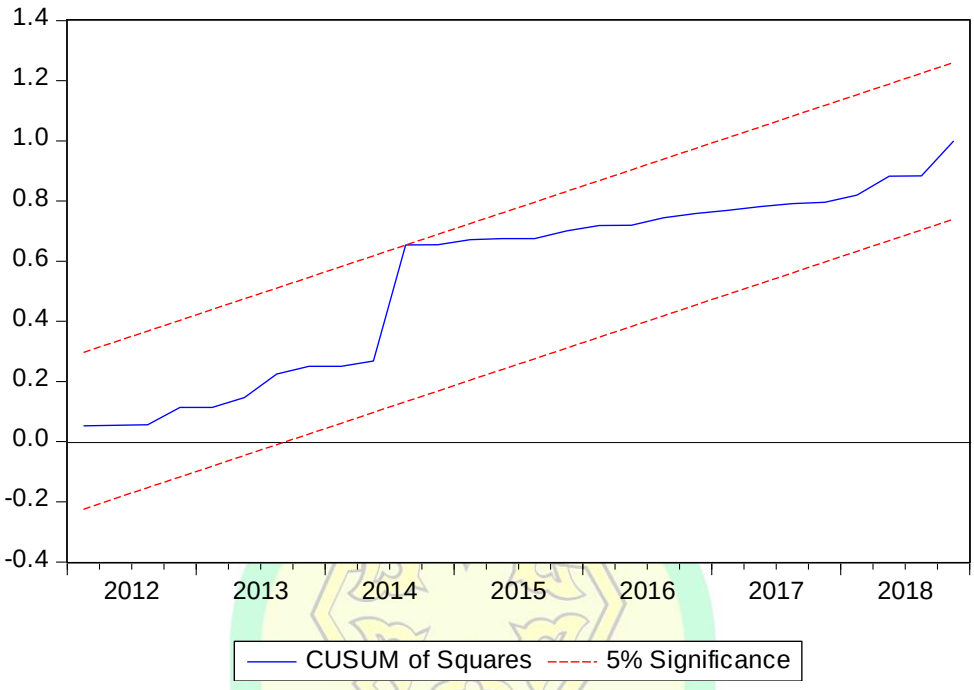

Gambar 4.5 Cusum Test

Sumber: Olah data eviews

Berdasarkan gambar 4.1 Model dinyatakan stabil karena garis biru tidak keluar dari batas garis merah. Artinya model ARDL dinyatakan stabil/lolos uji CUSUM dan seluruh variabel terverifikasi.

H. Interpretasi Hasil Model ARDL Dalam Ekonomi

1. Pengaruh PDB terhadap NPF

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang perubahan PDB direspon dengan negatif oleh NPF, ini dapat diterjemahkan bahwa peningkatan kondisi ekonomi akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Hal ini sesuai dengan penjelasan (Nova dan Ari, 2018) yang menyatakan bahwa Ketika PDB suatu negara tinggi maka bisa dikatakan pendapatan rata-rata masyarakat negara

tersebut juga tinggi. Peningkatan pertumbuhan PDB dapat dijadikan sebagai indikator bagi perbankan untuk menyalurkan kreditnya sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Ketika PDB mengalami peningkatan maka rasio NPF akan menurun. Apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat maupun perusahaan bertambah maka usaha yang dijalankan oleh produsen juga bagus. Ketika usaha tersebut bagus, risiko gagal bayar terhadap pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat ditekan karena nasabah mampu membayar kewajibannya.[99]

Perkembangan PDB sebagai salah satu indikator dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. PDB ini mencerminkan kapasitas keluaran yang dapat dihasilkan perekonomian dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam perekonomian . Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan individu maupun perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan individu maupun perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah.

Bahwa sesuai dengan teori Keynes pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil. Tetapi manakala perekonomian mengalami krisis, maka

[99] Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan, "Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap Non Performing Finance Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61* (Agustus 2018), 170.

konsumsi akan meningkat dikarenakan harga barang yang naik dan kelangkaan barang di pasar serta menurunkan tingkat tabungan masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap lembaga perbankan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh negatif -0.44054 signifikan pada level 10%. Peningkatan PDB biasanya mengarah pada membaiknya aliran pendapatan rumah tangga dan meningkatnya profitabilitas. Ketika keadaan ekonomi rumah tangga membaik tentunya akan berimbas pada terpenuhinya kewajiban yang dimiliki (NPF).[100]

Kristiani Naibaho Sri dan Mangesti Rahayu juga, menyatakan bahwa PDB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF. bahwa pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil (sesuai dengan teori Keynes). Tetapi manakala perekonomian mengalami krisis, maka konsumsi akan meningkat dikarenakan harga barang yang naik dan kelangkaan barang di pasar serta menurunkan tingkat tabungan masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap lembaga perbankan.[101]

2. Pengaruh kurs terhadap NPF

[100] Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini, "Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans", *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 3, No. 4, 2013.

[101] Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu. "Pengaruh GDP, Inflasi, Bi Rate, Nilai Tukar Terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 62 No. 2 September 201

Hasil estimasi pada model ARDL menunjukan bahwa kurs hanya berpengaruh terhadap NPF dalam jangka pendek, Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang berarti nilai mata uang domestik melemah (*depresiasi*) akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi. Bagi produsen dan pengusaha domestik yang menggunakan produk impor sebagai bahan baku akan mengalami kenaikan biaya produksi yang berdampak pada kenaikan harga dan penurunan permintaan produk. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian dan menurunkan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sehingga risiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi.[102]

Kurs digunakan mengukur nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang digunakan sebagai patokan devisa. Apabila kurs meningkat berarti nilai rupiah mengalami penuruanan (*depresiasi*) terhadap dolar, sebaliknya bila kurs turun maka nilai rupiah mengalami peningkatan (*apresiasi*) terhadap dolar. Menurunnya nilai rupiah akan menurunkan pendapatan perusahaan karena kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan naiknya biaya produksi. Keadaan ini yang menyebabkan pengusaha cenderung mengurangi modal yang diperoleh dari pembiayaan di bank. Di lain pihak, bank akan menghadapi meningkatnya resiko pembiayaan bermasalah karena meningkatnya biaya produksi. Namun

[102] Indri Supriani, Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia", *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6* 2018, 4.

permasalahan ini hanya berlaku dalam periode singkat karena baik internal perbankan maupun nasabah akan segera berbenah untuk menghadapi kondisi ini sehingga kondisi cenderung segera stabil.

Namun dalam jangka panjang nilai kurs sudah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, hal ini terjadi karena masyarakat sudah beradaptasi dengan perubahan nilai kurs. Masyarakat dalam hal ini produsen atau pengusaha akan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga lebih siap untuk menjalankan bisnisnya sehingga pendapatan kembali stabil dan mampu mengembalikan kewajibannya terhadap bank sehingga tidak mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah. Disisi lain dari internal bank ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar maka akan segera berbenah, ini terbukti bahwa bank syariah lebih tahan banting terhadap tekanan krisis. Alasannya adalah karena bank syariah cenderung bermain aman yang mana setiap transaksi dalam keuangan syariah harus dilandaskan pada aset dasar (*underlying aseet).*

Hasil ini didukung oleh temuan Yudhistira Ardana dan Rita Irviani, 2017 yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sejalan dengan itu Muthia Roza Linda dkk, 2015 menyatakan hal yang sama bahwa dalam jangka panjang fluktuasi kurs tidak berpengaruh terhadap NPL, karena perubahan kurs tidak begitu dirasakan oleh nasabah, keadaan tersebut terjadi karena perubahan kurs yang relatif terjadi dalam jangka pendek, sehingga situasi tersebut tidak begitu

mengganggu bisnis yang dijalankan nasabah, oleh sebab itu perubahan kurs rupiah tidak mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar tagihan kredit. Fenomena tersebut mendorong rasio kredit bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Loan* tidak mengalami perubahan berarti akibat adanya perubahan kurs.[103]

3. Pengaruh inflasi terhadap NPF

Hasil estimasi pada model ARDL menunjukan bahwa inflasi hanya berpengaruh terhadap NPF dalam jangka pendek, ini dikarenakan inflasi secara umum diartikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi sektor rill inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, dengan demikian inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Saat terjadi inflasi berdampak pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saaat terjadi inflasi. Meningkatnya inflasi menyebabkan pembayaran angsuran menjadi semakin tidak tepat sehingga menimbulkan kualitas pembiayaan yang memburuk dan

[103] *Muthia Roza Linda dkk, "Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang, "Economica Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2.*

bermasalah.[104] Sehingga inflasi berpengaruh positif terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF).

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan harga tarif listrik sebagai contoh akan mengakibatkan kenaikan Inflasi. Dan dampak yang paling dirasakan oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor perekonomian adalah meningkatnya beban usaha atau pengeluaran yang mereka harus keluarkan akibat naiknya tarif listrik dan naiknya harga BBM. Kenaikan beban usaha yang dirasakan sedangkan pendapatan tetap maka menyebabkan pelaku usaha tersebut kesulitan memenuhi kewajiban mereka membayar cicilan kredit kepada bank. Untuk itu diperlukan peran serta berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan fiskal agar dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan harga harus mengakomodir dan menyerap juga kepentingan pelaku usaha dari berbagai sektor perekonomian. Sehingga kenaikan harga yang terjadi tidak memberikan dampak yang terlalu parah terhadap pelaku usaha.

Kenaikan inflasi akan membuat harga relatif lebih mahal sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Dampak dari menurunkanya daya beli masyarakat ini akan mempengaruhi tingkat produksi perusahaan atau investor dan akan mempengaruhi turunnya target laba perusahaan. Keadaan ini akan menjadikan nisbah dan margin pembiayaan relatif lebih tinggi sehingga menjadikan pengusaha kesulitan untuk membayar pembiayaan di bank syariah. Oleh karenanya,

[104] Nopirin, *Ekonomi Moneter buku 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 32.

inflasi tinggi menimbulkan potensi meningkatnya resiko tidak terbayarnya kewajiban pembiayaan pada bank syariah.

Namun pengaruh ini tidak terjadi dalam jangka panjang, dikarenakan kenaikan harga barang dan jasa yang terus menerus akan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan tingkat konsumsinya. Sehingga akan mengatur kembali alokasi keuangan dalam rumah tangga sesuai dengan pos-pos yang diperlukan, dan salah satunya adalah pos untuk membayar kewajiban pembiayaan di bank syariah. Disisi lain pihak bank syariah juga akan cepat-cepat merespon keaadaan itu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas bank.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doan Thanh Ha dan Hoang Thi Thanh Hang, 2016 yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh pada NPF karena Ketika ekonomi menderita inflasi tinggi, pemerintah biasanya menerapkan pengetatan kebijakan fiskal dan moneter untuk membatasi pertumbuhan kredit untuk menstabilkan ekonomi makro.[105]

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Caesar Nawawi Syahid, yang menyatakan bahwa secara teori, inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup membagi pendapatannya untuk konsumsi dan menabung di bank, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup

[105] Doan Thanh Ha dan Hoang Thi Thanh Hang, "Determinants of Non-performing Loans: The Case of Vietnam", *Journal of Business and Economics* Volume 7, No. 7, 2016

tinggi, sedangkan penghasilan debitur tidak mengalami peningkatan, maka keinginan debitur untuk tetap menyimpan dananya di bank akan menurun sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga meningkat. Menurunnya keinginan debitur untuk menyimpan dananya di bank akan berdampak pada berkurangnya jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun di bank. Semakin sedikitnya DPK yang dapat dihimpun oleh bank, jumlah kredit yang disalurkan juga akan berkurang, maka risiko terjadinya kredit bermasalah (NPL) akan menurun dan sebaliknya.[106]

IAIN PONOROGO

[106] Dwi Caesar Nawawi Syahid, "Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut Psak 55", *Jurnal perbanas*, Vol 2, No 1 (2016).

BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Produk Dosmetik Bruto (PDB) dalam jangka pendek berpengaruh negatif (-3.647725) dan signifikan pada level 10% terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia. Dan dalam jangka panjang juga berpengaruh negatif (-853562) dan signifikan pada level 5% terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia.
2. Dalam jangka pendek perubahan kurs berpengaruhh positif (9.354158) dan signifikan pada level (1%) terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia.
3. Dalam jangka pendek inflasi berpengaruh positif (0.243666) dan signifikan pada level (1%) terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah di Indonesia

J. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal meningkatkan kinerja perekonomian, antara lain:

1. Otoritas Fiskal dan Moneter

Dalam rangka menjaga perekonomian menjadi lebih stabil terhadap tekanan global, beberapa kebijakan perlu dilakukan oleh otoritas fiskal. Inflasi masih menjadi momok bagi negara berkembang khususnya negara Indonesia, sehingga pengendalian harga agar tetap stabil menjadi program utama. *volatile food* masih menjadi penyumbang tertinggi terhadap inflasi di Indonesia, mengurangi impor dan memperkuat sektor pangan menjadi program unggulan yang harus digaungkan. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup baik di beberapa quartal terakhir perlu ditingkatkan lagi sehingga kondisi ekonomi semakin membaik dan daya beli masyarakat ikut meningkat sehingga diikuti dengan semakin tutunnya rasio pembiayaan bermasalah.

Dalam meningkatkan kinerja keuangan, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh otoritas moneter cukup membanggakan, hal ini dapat dilihat dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, otoritas moneter cakap dalam mengidentifikasi krisis yang terjadi, sehingga krisis tersebut tidak membuat kinerja keuangan domestik terpuruk. Otoritas moneter perlu melakukan suatu terobosan kebijakan agar iklim keuangan dan persaingan industri keuangan di Indonesia menjadi lebih kompetitif,

karena dalam jangka waktu lima tahun terakhir, saat kondisi perekonomian riil menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan tidak diikuti dengan baik oleh perekonomian pada pasar keuangan, sehingga pertumbuhan yang dicapai kurang optimal. otoritas moneter juga perlu mempertegas kembali kepada industri perbankan agar lebih maksimal menyokong UMKM di Indonesia, karena lewat UMKM akan banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

2. Peneliti selanjutnya

Karena terbatasnya penelitian ini maka bagi peneliti selanjutnya lebih mengeksplore lagi pembahasan terkait hubungan ekonomi makro dengan sektor perbankan. Dalam jumlah variabel hendaknya menambah lebih banyak lagi variabel makro seperti suku bunga, jumlah uang beredar, ekspor impor, dan lain-lain. Dalam metode penelitian yang digunakan hendaknya dapat membandingkan beberapa metode ekonometrika baik metode dinamis maupun statis seperti *Ordinary Least Square* (OLS), *Engle Granger* dan *Vector Error Correction Model* (VECM), *Partial Adjusment Model* (PAM), *Buffer Stock Model* (BSM) dan lain-lain. Harapannya adalah akan ditemukan teori-teori yang baru yang lebih relevan untuk diaplikasikan dalam praktek nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini," Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans", *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 3, No. 4, 2013.

Ariefianto. Moch. Doddy. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga 2012.

Asser, Tobias M.C., *Legal Aspects of Regulatory Treatment of Banks in Distress*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2001)

bramantyo, Johanputro, *Prinsip-prinsip ekonomi makro* (Jakarta: PPM, 2008),

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005),

Departemen kebijakan makroprudensial, *mengupas kebijakan makroprudensial*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Fahmi, Irham, *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta 2014.

Ghazali, Imam. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21"* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013),.

Greene, Willliam H. *Econometric Analysis*. New Jersey: Pearson Education, 2002).

Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. *Risk Analisis For Islamic Bank*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Gujarati, Damodar N. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Gunawan, Anang Budi, "Fundamental Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika", *jurnal Bappenas* edisi 01 tahun xx mei 2014,

Hermanto dan Endah Saptuningsih, *Electronic Data Processing SPSS 10 dan Eviews 3.0*. (UPFe. UMY, 2002)

Hermawan Soebagia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di Indonesia* (Tesis, Program Pasca Sarjana Magister. 2005).

Indri Supriani, Heri Sudarsono, “Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia”, *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6* 2018,

Karim, Adimarwan. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu. “Pengaruh GDP, Inflasi, Bi Rate, Nilai Tukar Terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 62 No. 2 September 2018

Madura, Jeff. *Keuangan Perusahaan Internasional, Edisi 8* (Jakarta: Salemba Empat, 2006),

Mankiw, Gregory N. *Teori Makroekonomi (edisi kelima)*. Jakarta: Gelora Angkasa Pratama, 2003.

Mankiw, N. Gregory, *Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006.),

Mukhlis, Imam. *Ekonomi Keuangan dan Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat 2015.

Muthia Roza Linda dkk, “Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang” *Economica Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Nopirin, *Ekonomi Moneter buku 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the’analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3).

Purba, Nova Shenni dan Ari Darmawan,” Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap Non Performing Finance Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61*(Agustus 2018).

Putong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2013.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Simorangkir, Iskandar dan Suseno. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. Jakarta: Bank Indonesia, 2004.

Sims, Christopher A. *Macroeconomics and Reality, Econometrica*, Vol. 48, No. 1. (Jan., 1980).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013.

Suhardjono, Kuncoro Mudrajad et.al. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2002.

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

Usman, Berto & Kamaludin, Darmansyah. *Determinan Non Performing Loan (NPL) Pada Industri Perbankan* (Bukti Empiris Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia). 2015.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta,: UPP STIM YKPN, 2013.

https://tirto.id/saat-dolar-rp15000-apakah-perbankan-akan-terpukul-cWKV, Diakses 11 Maret 2019.

http://blog.eviews.com/2017/05/autoregressive-distributed-lag-ardl.html. Diakses 22 oktober 2019

https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx diakses 22 oktober 2019

https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-npf-bank-syariah-masih-tinggi, diakses 22 oktober 2019.

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253? Diakses 24 oktober 2019

PONOROGO

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829203858-532-326016/alasan-pemerintah-target-ekonomi-7-persen-jokowi-tak-tercapai, Diakses 24 oktober 2019

IAIN
PONOROGO